



100

**PERTANYAAN TOP
SEPUTAR
KHILAFAH**

Adnan Khan
Khilafah.com

LIMA BENDA YANG KHILAFAH BERIKAN PADA DUNIA.

1. UNIVERSITAS

Asal-usul gelar doktor berasal dari *ijazat attadris wa 'l-iffthd* (izin mengajar dan mengeluarkan pendapat hukum) di Madrasah-Madrasah yang mengajarkan hukum Islam di seantero tanah Islam. Universitas Al Karaouine di Fez, Maroko adalah universitas tertua di dunia yang memberikan gelar. Didirikan tahun 859 ia adalah universitas pertama yang menghasilkan para diploma.

Universitas Al-Azhar, didirikan di Kairo, Mesir pada 975, menawarkan beragam kualifikasi akademik termasuk derajat pasca-sarjana dan dianggap universitas lengkap pertama.



2. RUMAH SAKIT

Rumah sakit pertama yang dikenal di dunia Islam dibangun di Damaskus pada tahun 706 oleh seorang Khalifah Umayyah, Al-Walid.

Di masa itu kebanyakan rumah sakit Islami punya para dokter yang mendiagnosis dan merawat semua pasien, tapi rumah sakit Bimaristan unik bahwa ia punya para dokter yang berspesialisasi pada penyakit-penyakit tertentu. Asalnya, pusat-pusat kesehatan ini secara khusus adalah untuk para pasien dengan kondisi-kondisi khusus seperti wabah mematikan dan kebutaan, dan semua jasanya gratis.

Rumah sakit terbesar di masa Abad pertengahan dibangun di Kairo, Mesir, oleh Sultan Qalaun al-Mansur di 1285. Rumah sakit ini punya bilik-bilik terpisah untuk beragam penyakit dan untuk pemulihan dan punya laboratorium, apotek, klinik umum, dapur, kamar mandi, perpustakaan dan aula pengajaran.

4. PARASUT

Di abad ke-9, Ibnu Firnas menemukan versi primitif dari parasut, dia melompat dari menara masjid Mezquita di Cordoba menggunakan jubah mirip sayap sebagai penghambat gerak jatuh - dia mendarat dengan cedera kecil saat awal tes penerbangannya.

Parasut hari ini dibangun dari desain dan eksperimen di masa lalu. Ibnu Firnas dari Spanyol Islam menemukan, membangun dan menguji parasut di tahun 800-an.

Roger Bacon mempelajari cara terbang dari referensi-referensi yang mengutip karya-karya Ibnu Firnas. Temuan Bacon 500 tahun setelah Ibnu Firnas dan temuan Da Vinci sekitar 700 tahun setelahnya. Percobaan awal parasut Ibnu Firnas menjadi pondasi bagi pembuatan parasut yang lebih sempurna dibuat dari kain linen yang terbentang seluas kerangka kayu.



3. UANG PENSIUN

Pada tahun 700 sebuah administrasi untuk pensiun dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang merupakan pertama kalinya dan bermulanya sistem pensiun. Melalui berbagai pungutan yang sah menurut Islam, uang didistribusikan kepada yang sakit dan miskin dan mereka yang telah melampaui usia kerja. Dampaknya adalah terstimulasinya perekonomian karena kekayaan terdistribusi secara luas.



5. MESIN

Karya Al-Jazari di abad ke-12 ketika ia menemukan tuas berbusur, dan menciptakan gerak rotor melalui penggunaan batang dan silinder mengawali pengembangan mesin berbahan bakar. Dialah yang melibatkan hal ini pada sebuah mesin.

Mesin berbahan bakar mengawali pengembangan otomotif di mana pembakaran bahan bakar dalam sebuah mesin pada piston-piston menyebabkan gerakan bagian-bagian lain yang akhirnya menggerakkan mobil.



The Top 100 Questions on Khilafah

Adnan Khan
Khilafah.com

100 Pertanyaan Top Seputar Khilafah

Penerjemah: Annas I. Wibowo, SE

Daftar Isi

Pendahuluan-----	3
Pemerintahan-----	4
Hukum-----	13
Masyarakat-----	17
Ekonomi-----	23
Politik-----	32
Kesimpulan-----	40
Referensi-----	42

Pendahuluan

Setahun setelah Revolusi Arab di Januari 2012 banyak perubahan terjadi di dunia Muslim dan getarannya terus menggema di seantero dunia. Sementara revolusi di dunia Muslim berlanjut, persepsi-persepsi tentang dunia Muslim di dalam maupun di luar wilayah itu terus berdinamika.

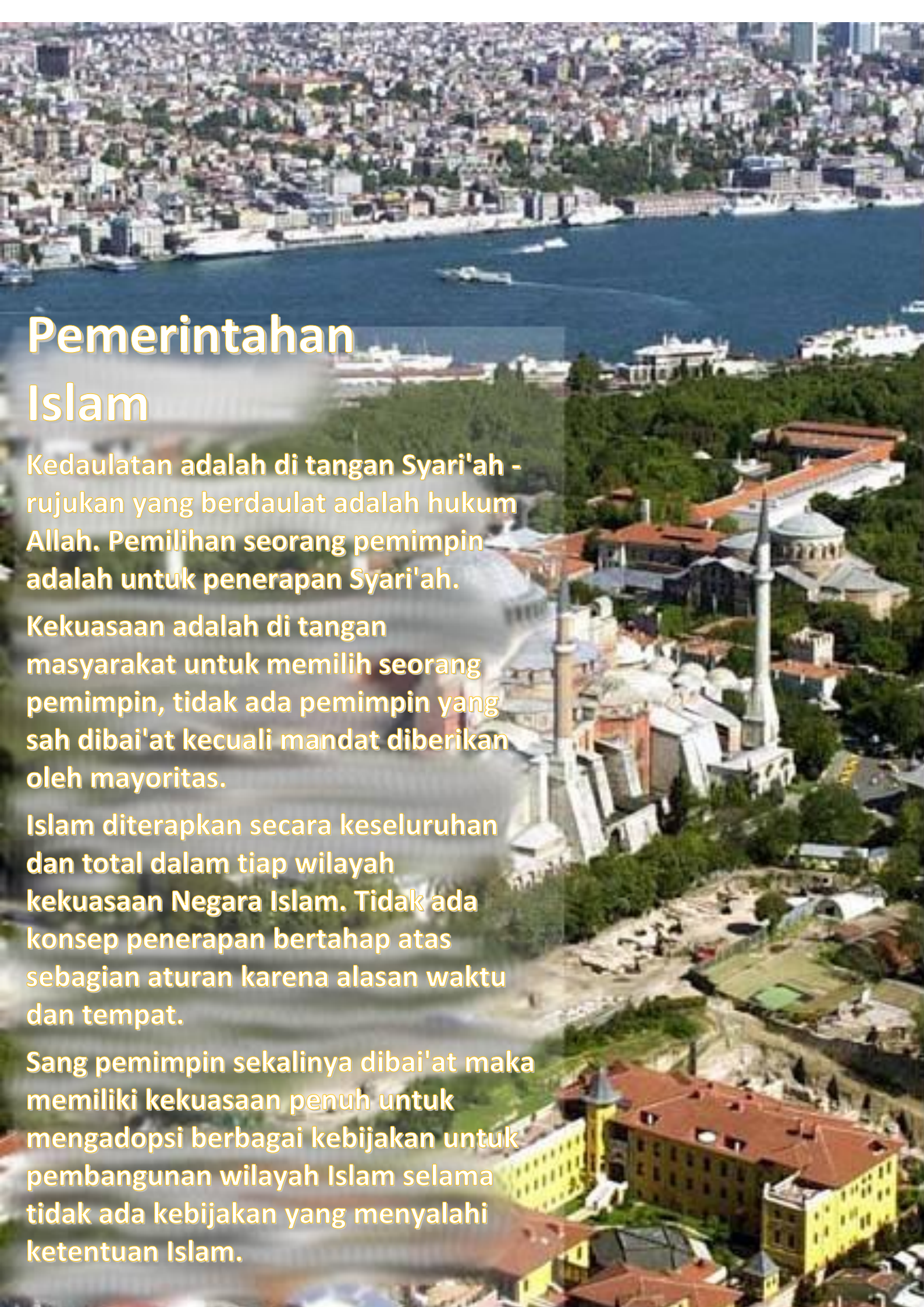
Kegagalan kebanyakan partai sekular dalam pemilu yang terjadi di tanah-tanah Muslim telah memaksa banyak pihak di Barat untuk mengevaluasi posisi mereka. Pencitraan awal oleh partai-partai Islami yang menang pemilu sistem demokrasi telah mengantarkannya ke realitas pemerintahan. Debat seputar Islam dan sekularisme berlanjut membesar seiring seruan Islam di wilayah itu membesar. Usaha-usaha oleh Barat untuk membajak revolusi terus berlanjut dan tren ini berlanjut di Suriah karena Barat berusaha memastikan perubahan apapun yang terjadi hanyalah perubahan kosmetik.

Untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan revolusi tidaklah dibajak, adalah penting bahwa seruan Islam itu jelas dan seruan Islam itu adalah untuk penerapan Islam lengkap. Apa arti tepatnya ini? Sebagai Muslim kita punya iman bahwa sistem Islam adalah sistem terbaik tapi kadang kita mendukung ide ini tanpa tahu kebijakan macam apa yang akan diterapkan, dan ini menjadi banyak pertanyaan di pikiran kita. Apakah Islam benar-benar mampu memerintah di abad ke-21? Apakah Islam punya solusi masalah ekonomi dunia Muslim? Apa kata Islam tentang hubungan dengan negara asing? Bisakah Islam memecahkan masalah sektarian masa kini? Bagaimana sistem Islam didirikan? Apakah ini sistem yang akuntabel dan representatif?

Tujuan buku ini adalah untuk menyediakan jawaban-jawaban atas pertanyaan praktikal. Buku ini bersasaran untuk meliputi area-area penting pemerintahan, ekonomi, kebijakan luar negeri dan hukum. Banyak buku telah ada yang merinci bermacam sistem Islam seperti sistem ekonomi, sistem sosial, sistem peradilan, sistem pemerintahan dan lainnya. Untuk memahami semua aspek sistem Islam secara rinci diperlukan pemahaman dasar terhadap prinsip-prinsip tiap sistem itu.

Buku ini bersasaran untuk menunjukkan pandangan Islami, yang dibuat secara gamblang dan mudah bagi tiap orang untuk dipahami tanpa banyak detail. Jawaban-jawaban yang diberikan juga memandu kepada pendalaman yang lebih rinci bagi tiap area, yang memungkinkan studi lebih lanjut.

Adnan Khan
26 Agustus 2012
8 Syawal 1433 H



Pemerintahan Islam

Kedaulatan adalah di tangan Syari'ah - rujukan yang berdaulat adalah hukum Allah. Pemilihan seorang pemimpin adalah untuk penerapan Syari'ah.

Kekuasaan adalah di tangan masyarakat untuk memilih seorang pemimpin, tidak ada pemimpin yang sah dibai'at kecuali mandat diberikan oleh mayoritas.

Islam diterapkan secara keseluruhan dan total dalam tiap wilayah kekuasaan Negara Islam. Tidak ada konsep penerapan bertahap atas sebagian aturan karena alasan waktu dan tempat.

Sang pemimpin sekalinya dibai'at maka memiliki kekuasaan penuh untuk mengadopsi berbagai kebijakan untuk pembangunan wilayah Islam selama tidak ada kebijakan yang menyalahi ketentuan Islam.

1. Apakah Syari'ah ketinggalan zaman?

Islam memandang manusia terdiri dari naluri dan kebutuhan yang terus menghadapi problem dalam pemenuhannya. Dalil Islam datang menyeru laki-laki dan perempuan sebagai manusia, tidak hanya sebagai individu yang hidup di Gurun Arab abad ke-7. Nash Islam tidak menyeru manusia di waktu dan tempat tertentu belaka. Manusia hari ini sama dengan manusia yang hidup 1400 tahun yang lalu dan akan tetap sama dengan manusia 1400 tahun yang akan datang. (Lebih lanjut lihat "Islamic Reformation, the battle for hearts and minds," Khilafah.com)

Tidak ada keraguan bahwa dunia hari ini sangat berbeda dengan masa di mana Islam muncul dan berkembang. Gaya hidup orang hari ini berbeda dengan orang seabad lalu. Di masa lalu orang tinggal di gubuk-gubuk dan hari ini di gedung pencakar langit, tapi kita masih perlu rumah dan atap di atas kepala kita. Di masa lalu Nabi Muhammad Saw. mengirim para utusan yang menunggang kuda kepada para penguasa negara lain sementara hari ini sebuah pesan bisa dikirim melalui e-mail, IM, fax atau SMS. Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya berperang menggunakan kuda, panah dan busur sementara hari ini perang tetap berkobar, tapi menggunakan teknologi 'Smart', misil dan intelijen satelit. Di masa lalu kaum Muslim belajar astronomi sehingga bisa menentukan arah Qiblat di manapun mereka pergi sementara hari ini sebuah jam elektronik bisa digunakan. Ini menggambarkan bahwa manusia, berkaitan dengan kebutuhannya, adalah sama dan problem yang mereka hadapi tidak berubah. Perubahan apapun yang kita indera hanyalah perubahan peralatan atau perlengkapan yang digunakan manusia ketika memecahkan problem.

Waktu tidaklah cukup digunakan untuk mementahkan suatu pemikiran, ini karena ide tidaklah terikat waktu. Contohnya pembangkitan filosofi, seni dan budaya Yunani yang dinamai renaissance terjadi di Eropa Abad ke-16. Kebanyakan hukum yang kita jumpai hari ini di seantero dunia Barat berasal dari 3 milenium yang lalu, yang masih dianggap valid hari ini. Sebagai contoh:

- Bill of Rights AS, terbit tahun 1791, mengenai jaminan proses pengadilan yang diambil dari Magna Carta di 1215.
- hukum sipil modern dikembangkan dari teori pertanggungjawaban yang berasal dari hukum Romawi.
- Common law, yaitu prinsip menentukan kasus dengan melihat putusan hukum yang pernah terjadi sebelumnya berasal dari Abad Pertengahan dari hukum Romawi dan dipengaruhi oleh budaya Norman Saxon. Hari ini itu tetap jadi sumber legislasi bagi Inggris, AS dan Kanada.

Dari perspektif ini demokrasi tentunya sudah kuno karena berasal dari masa kuno. Jadi fakta bahwa Islam muncul di Arab abad ke-7 bukanlah argumen untuk membatalkan Islam di masa modern. Karena teks Islam berurusan dengan manusia dan kebutuhannya, dan bukan dengan peralatan yang digunakan untuk memecahkan masalahnya, Syari'ah Islam adalah relevan untuk manusia hari ini sebagaimana dahulu ketika diterapkan oleh orang-orang Arab. (Lebih lanjut lihat "Islam in the 21st century," Khilafah.com)

2. Adakah sebuah Negara Islam di dunia hari ini, seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan atau Afghanistan (Taliban)?

Tidak, negeri-negeri Muslim sekarang punya sebagian aspek hukum Islam yang diterapkan; yang paling umum adalah sebagian hukum keluarga, tapi tidak ada negara yang membuat hukum dan kebijakannya berdasarkan nash Islam semata.

Di Pakistan, hukum Islam dirujuk dalam rangka memecahkan perkara keluarga, terdapat pula debat mengenai hukum hudud untuk menunjukkan kepedulian simbolik terhadap perasaan Islami di masyarakat. Ini adalah taktik para pemerintah yang korup dan tidak sah menurut hukum Allah. Demikian pula para tuan Barat mereka dan media massanya berusaha menampilkan bahwa pemerintahan Islam tidak bisa dipakai dan tidak mampu mengatur masyarakat. (Lebih rinci lihat "The Methodology of Hizb ut-Tahrir for Change" Hizb ut-Tahrir)

Mungkin Saudi Arabia memang memberi donasi jutaan kitab al-Qur'an al-Karim, buku-buku Islam, dan banyak uang untuk membangun Masjid-Masjid dll. di seantero dunia, namun Saudi memerintah dengan suatu campuran hukum-hukum, beberapa di antaranya Islami dan beberapa yang lainnya buatan manusia. Namun, untuk menjaga citra Islaminya, dia tidak menyebut itu hukum-hukum. Saudi menggunakan istilah tertentu untuk membedakan antara hukum Islam dengan yang buatan manusia. Di buku berbahasa Arab konstitusi Arab Saudi si penulis menyebutkan, "*Kata 'hukum (anoon)' dan 'Legislasi (Tashree)' hanya digunakan di Saudi untuk menyebut aturan-aturan yang diambil dari Syari'ah Islam ... Sementara untuk yang buatan manusia semacam 'sistem (Anthimah)' atau 'instruksi (Ta'leemaat)' atau 'keputusan (Awamir)' ...*" ("The Constitutional Laws of The Arab Countries," chapter "The Constitution of The Kingdom of Saudi Arabia.") Selain itu, Arab Saudi adalah sebuah monarki keturunan yang menggunakan perkara religi sebagai alat untuk mengendalikan pihak oposisi sehingga agenda para kapitalis dan pro-Barat tetap lancar.

Taliban juga menerapkan beberapa aspek dari Islam. Taliban ketika mereka memerintah atas Afganistan menyatakan tidak akan merujuk sistem Khilafah - yang merupakan sistem pemerintahan Islam satu-satunya, tapi sebuah Keemiran - yaitu sebuah entitas politik yang menerapkan satu set hukum di wilayahnya, tanpa kebijakan luar negeri. Sistem pemerintahan Islam menerapkan semua aturan Islam, dalam ekonomi, sosial, dan pemerintahan juga menjalankan kebijakan luar negeri. Khilafah bukanlah negara pasif dalam isolasi.

Konstitusi Iran punya banyak pasal yang sesuai dengan Islam tapi banyak yang bertentangan. Artikel 6 konstitusi Iran berbunyi: "*Republik Islam Iran, urusan negara harus diatur atas dasar pendapat publik yang ditunjukkan dengan cara pemilu, termasuk pemilihan Presiden, para wakil di Badan Konsultatif Islam, dan para anggota dewan, atau melalui referendum dalam perkara yang dijelaskan di artikel lain konstitusi ini.*" Sistem pemerintahan Islam - Khilafah didasarkan semata atas teks Islam. Ini tidak terjadi di Iran karena dia berkata dalam konstitusinya "*menjalankan pengurusan negara berdasarkan pendapat massa melalui pemilu.*" Dalam Islam, menjalankan pengurusan negara adalah berdasarkan Syari'ah bukan opini rakyat.

3. Apakah Turki hari ini bukan Khilafah?

Turki hari ini diperintah oleh pihak yang katanya sebuah partai Islam. Ia nampak sebagai presiden Islami dan perdana menteri Islami. Karena hal ini, model pemerintahan Turki mendapat popularitas sekaligus citra negatif. Model pemerintahan ini banyak dipuji para politisi dan sekularis Barat yang percaya bahwa penggabungan aturan Islam dengan sekularisme adalah agenda penting untuk diusahakan di seantero tanah Muslim.

Yang menarik, di dunia Muslim model bagi Turki satu-satunya yang dikenal (sah) adalah Khilafah yang pernah mengubah bangsa Ottoman - sekelompok petarung menjadi superpower dunia. Dalam menganalisis klaim bahwa Partai AKP mewakili model pemerintahan Islam perlu diteliti kebijakan utamanya yaitu tampak bahwa Islam tidak memainkan peran dalam kebijakan AKP selain menjadi umpan retorika bagi massa belaka. Kebijakan ekonomi dan luar negeri masih jadi simbol utama AKP, dan semuanya berjalan dengan faktor-faktor selain Islam.

Dalam rangka mendulang dukungan bagi AKP, Erdogan membuat kebijakan ekonomi untuk mengalirkan uang ke Turki yang hanya memperkaya elit bisnis. Islam melarang hal ini dan akan berpaling dari sistem gaya Barat yang khusus memperkaya kaum elit kepada sistem pendistribusian kekayaan syariah. Demikian pula, Islam bisa dikatakan tidak memainkan peran dalam kebijakan luar negeri Turki. Contoh paling gamblang adalah Erdogan melanjutkan hubungan dengan Israel yang sesungguhnya jelas dilarang Islam. AKP tidak menggunakan Islam sedikitpun dalam kebijakan luar negerinya. Bukannya menggalang para pemegang kekuatan di dunia Muslim untuk melawan Israel (sebagaimana dilakukan Salahudin al-Ayoubi) atau bahkan mengakhiri pendudukan Al Quds sendiri - yang mampu dilakukan Turki, Erdogan malah membuat satu set kebijakan dangkal sempit dan mencampurnya dengan pernyataan-pernyataan Islami.

Turki tidak mewakili model pemerintahan Islam, realitasnya Turki adalah negara sekular dan kebangsaan sebagaimana negara-negara Barat. (Lebih lanjut lihat "Deciphering the 'Turkish model' of government," New Civilisation)

4. Apakah Khilafah demokratis atau kediktatoran?

Negara Islam bukan kedua-duanya. Para pemerintah kolonial Barat telah menjadikan perkara pemilu bersinonim dengan demokrasi, padahal itu tidaklah benar. Khilafah akan punya pemilu untuk memilih, termasuk Khalifah, tapi tidak ada yang berhak membuat syari'at (hukum) – oleh sedikit orang ataupun banyak orang sebagaimana dalam demokrasi. Ini artinya bahwa rakyat akan bisa memilih wakilnya tapi di waktu yang sama para wakil tidak punya wewenang untuk menyalahi Syari'ah dan menetapkan hukum rusak seperti kekebalan hukum bagi penguasa. (Lebih rinci lihat "The Ruling system of Islam" Hizb ut-Tahrir)

Di masa kini istilah kediktatoran menunjuk pada suatu bentuk otokrasi kekuasaan absolut dengan kepemimpinan yang tak tersentuh hukum, konstitusi, atau faktor sosial dan politik dalam suatu negara. Ini menyalahi aturan Islam karena Khalifah terikat secara keseluruhan dengan Syari'ah dan berbagai perangkat pertanggung jawabannya. Khalifah tidak pula kebal hukum, tapi sama seperti warga negara lainnya. (Lebih rinci rujuk "The Khilafah is not a Totalitarian State," Khilafah.com)

5. Empat Khalifah yang pertama dahulu dipilih melalui pemilihan, bukankah itu demokrasi?

Ketika kaum Muslim bicara soal demokrasi, pemahaman yang masih banyak beredar adalah bahwa pemerintahan yang akuntabel, tegaknya hukum, dan pemerintahan yang benar-benar mewakili adalah bersinonim dengan pemilu demokrasi. Namun, sementara nilai-nilai itu sering disebut, sebenarnya jarang terwujud. Islam, dengan membolehkan beberapa mekanisme untuk memilih pemimpin, memastikan bahwa nilai-nilai itu terjaga. Sebagian dari Khulafaur Rasyidin dipilih melalui pemilu sedangkan sebagian yang lain diusulkan kemudian disetujui oleh mayoritas. Namun yang pasti adalah bahwa kehendak Umat dalam memilih pemimpin bisa terlaksana dan *good governance* terjaga. (Lebih rinci rujuk "Democracy is a system of Kufr" Khilafah publications)

6. Bukankah demokrasi liberal adalah perkara yang universal dan umum bagi semua orang termasuk kaum Muslim?

Bagi dunia Barat, proses sejarah yang mereka lalui dianggap sebagai sejarahnya dunia dan disebut modernitas, sementara semua pemikiran lainnya dianggap primitif jika tidak cocok dengan Liberalisme (Kapitalisme).

Bagi Barat, 'modernitas' membawa konotasi tertentu dari misi Pencerahan, yaitu gerakan berpisah dengan agama. Misi ini menghasilkan perkembangan sekularisme dan membuang Gereja, termasuk ajarannya dan dogmanya ke ranah pribadi. Selain itu juga ada konsep HAM, persamaan dan kebebasan. Di kemudian hari proses sejarah ini disebut 'modernisme'. Bagi para sekularis, memeluk nilai-nilai sekular liberal disebut modern dan apapun yang tidak cocok dengan nilai-nilai itu dianggap terbelakang dan tidak berbeda dengan Gereja abad pertengahan.

Kapitalisme dalam kenyataannya adalah khusus bagi ideologi Barat, sebuah peristiwa yang terjadi di Eropa yang lalu dituduhkan juga bahwa itu mujarab bagi dunia Muslim. Tidaklah benar menuduh semacam itu dan melihat Islam melalui kacamata demokrasi liberal yang merupakan pemikiran Barat dan sejarah Barat, itu semua bukan milik kaum Muslim. (Lebih rinci lihat 'Islamic Reformation, the battle for hearts and minds,' Khilafah.com)

7. Apakah Islam memisahkan agama dan politik seperti demokrasi?

Tidak. Sekularisme yaitu pemisahan agama dari kehidupan politik, adalah prinsip Barat dan tidak dikenal oleh Islam. Teks Syari'ah yang diwahyukan oleh Allah Swt. dalam al-Qur'an dan apa yang telah disebutkan dalam Ahadits adalah sumber legislasi dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik. (Lebih rinci lihat 'Democracy is a system of Kufr,' Hizb ut-Tahrir)

8. Apakah Khilafah mengadakan pemilu?

Pengangkatan Khalifah adalah berdasarkan kehendak mayoritas. Kehendak mayoritas dalam pemilihan pemimpin negara Islam bisa ditentukan melalui beragam mekanisme, termasuk pemilu. Oleh karenanya pemilu mewakili satu gaya dalam memilih Khalifah. Pengangkatan Khulafa ur-Rasyidin menunjukkan bahwa beberapa mekanisme bisa digunakan dalam memilih seorang pemimpin. (Lebih rinci rujuk "Ruling System," Hizb ut-Tahrir)

9. Apakah Khilafah punya Parlemen?

Parlemen adalah sebuah institusi dalam sistem demokrasi, yang melakukan tugas membuat hukum di samping juga tugas lainnya. Seorang Anggota Parlemen yang terpilih memiliki tugas yaitu diantaranya: meminta tanggung jawab pemerintah, membuat hukum (legislasi), memilih presiden dan menyetujui proyek-proyek dan perjanjian.

Parlemen mungkin punya kesamaan dengan Majelis Umat, karena keduanya adalah badan yang mewakili rakyat. Tapi sesungguhnya keduanya berbeda karena Majelis Umat dalam negara Islam memberi konsultasi bagi Khalifah dalam hal hukum Islam dan administrasi yang akan diadopsi oleh Khalifah dan untuk meminta tanggung jawab pemimpin dan untuk menasihati. Para anggota Majelis yang Muslim juga punya hak untuk mengusulkan kandidat jabatan Khalifah (jika kondisi mengharuskan ada Khalifah baru). (Lebih rinci lihat "The Ruling on Muslim Participation in the Political Life of the West," Hizb ut Tahrir)

Parlemen adalah institusi pembuat hukum yang sangat bertentangan dengan Islam.

10. Apakah ada sistem pemerintahan Islam selain Khilafah?

Pemeriksaan terhadap al-Qur'an menunjukkan banyak ayat untuk diterapkan dan dijalankan mengenai bidang militer, pidana, politik maupun ekonomi. Itu semua secara nyata selalu diterapkan di masa hidup Rasulullah Saw., periode Khulafa Ar-Rasyidin, juga selama pemerintahan para Khalifah sesudah mereka. Nabi Saw. mengkonfirmasi bahwa Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam, (Lebih lanjut lihat, 'The Centrality of Khilafah in Islam,' Hizb ut-Tahrir, Britain) Nabi Saw. bersabda dalam sebuah hadits:

"Bani Israel itu dipimpin oleh para Nabi, tatkala seorang Nabi telah wafat, dia pasti akan digantikan oleh Nabi yang lain, Namun tidak ada Nabi setelahku. dan yang ada adalah para khalifah, jumlah mereka pun banyak." Mereka bertanya: 'apa yang Anda perintahkan kepada kami?' Beliau menjawab: "Tunaikanlah bai'at kepada mereka, satu demi satu dan berikanlah kepada mereka hak mereka, karena Allah akan menanyai mereka atas apa yang Dia pertanggungkan pada mereka." (Bukhari, Sahih, #3455 dan Muslim, Sahih, #4750)

11. Apakah Khilafah hanya berlangsung 30 tahun?

Pemahaman semacam ini biasanya dibuat berdasar hadits yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, yang menyatakan bahwa Nabi Saw. bersabda, *"Khilafah dalam Umatku setelahku akan ada tiga puluh tahun. Kemudian akan ada Mulk setelahnya."* Sebagian orang menerjemahkan kata *mulk* dengan Kerajaan. Periode Khilafah Rasyidah berlangsung 30 tahun: 2 tahun 3 bulan bagi Abu Bakar ra., 10 dan 1/2 tahun bagi Umar ra., 12 tahun bagi Utsman ra., 4 tahun 9 bulan bagi Ali ra., dan 6 bulan bagi al-Hasan ra.

Khilafah itu sendiri berlanjut hingga peruntuhannya oleh Mustafa Kemal beserta Inggris di Turki pada 3 Maret 1924. Kata *mulk* punya banyak arti, kamus bahasa Arab terkenal, seperti 'Al-Muhit' oleh Fairuz Al-Abadi, jelas menunjukkan hal ini. Kata *mulk* di antaranya berarti kerajaan, tapi juga berarti seorang yang memimpin atas rakyat, dan juga kata "*hukm*" (kekuasaan), adalah sinonim dengan kata *sultan* (otoritas), dan *mulk* (kekuasaan). Jadi setelah 30 tahun Khilafah tidak berakhir, ini bisa dibuktikan oleh pendirian tokoh besar seperti para ulama seperti Imam Abu Hanifah dan muridnya Imam Abu Yusuf. Ketika digabung dengan dalil-dalil lain yang jelas menunjukkan pemerintahan Islam terus berlanjut setelah 30 tahun, maka jelas bahwa Khilafah Rasyidah memang berakhir setelah 30 tahun, tapi Khilafah berlanjut. Sementara pemerintahan Islam berjalan melalui bermacam fase dalam sejarah, dari kekeliruan penerapan hingga

kuatnya penerapan, teks Islam - Syari'ah tetap selalu menjadi sumber hukum hingga tahun-tahun terakhir Khilafah Utsmani. (Lebih rinci rujuk "How the Khilafah was destroyed" Hizb ut-Tahrir)

12. Apakah Imam Mahdi tidak dikabarkan sebagai orang yang mendirikan kembali Khilafah?

Tidak, dalil-dalil Islam yang menunjukkan kedatangan Imam Mahdi mengindikasikan bahwa Khilafah ketika itu sudah ada terlebih dahulu. Terdapat hadits riwayat Abu Dawud yaitu hadits dari Umm Salamah, bahwa dia berkata,

"Akan terjadi perselisihan di saat kematian seorang Khalifah, sehingga seorang laki-laki dari Madinah akan keluar ke Makkah, dan penduduk Makkah akan datang kepadanya dan membawanya (sebagai calon Khalifah) dia sendiri merasa keberatan, dan penduduk Makkah memba'atnya di antara Rukun (Ka'bah di mana terdapat hajar aswad) dan Maqam (Ibrahim). Sebuah pasukan ekspedisi akan dikirim melawan dia dari Syam (Suriah dan sekitarnya) dan bumi akan menelan mereka dalam gurun tak berair di antara Makkah dan Madinah. Ketika orang-orang melihat itu, abdul dari penduduk Syam akan datang padanya dan para penduduk Iraq dan mereka akan memba'atnya. Kemudian seorang lelaki Quraisy akan bangkit (dalam pemberontakan) yang paman dari jalur ibunya adalah (dari suku) Kalb, dan sebuah pasukan ekspedisi akan dikirim melawan mereka dan mereka akan mengalahkannya, dan itulah pasukan ekspedisi Kalb, dan ada kekecewaan bagi siapapun yang tidak menghadiri (pembagian) ghanimah Kalb. Maka dia akan membagi harta itu, dan dia akan berlaku di antara rakyat menurut Sunnah Nabinya dan dia akan menyebar Islam dengan lehernya di muka bumi. Dia akan tetap ada tujuh tahun, kemudian mati dan kaum Muslim akan mensholatinya." (Abu Dawud Jilid 36, nomor 427)

13. Apakah Khilafah bukan negara teologi, yang dikuasai oleh para agamawan?

Tidak! Teokrasi sejatinya percaya bahwa terdapat kelompok atau para pemimpin yang ma'shum (suci tak bisa salah) dan yang punya hak eksklusif untuk menjelaskan wahyu, di mana tidak ada yang boleh membantah penjelasan mereka dan siapapun yang melakukannya akan dihukum. Kenabian adalah posisi teologi, yang Allah berikan pada siapapun menurut kehendakNya. Sebaliknya Khilafah adalah posisi jabatan manusia di mana rakyat memilih siapapun yang mereka kehendaki. Khilafah setelah Rasulullah Saw. dipegang oleh para manusia, yang bukan Rasul. (Lebih rinci lihat "Islamic personality vol 2," Hizb ut-Tahrir)

Sistem politik Islam bukanlah teokrasi sehingga boleh bagi siapapun Muslim untuk membahas aturan Islam apapun baik itu para ulama maupun khalifah. Dalam sebuah hadits Nabi Saw. memerintahkan umat mengenai pemerintahan:

"Bani Israel itu dipimpin oleh para Nabi, tatkala seorang Nabi telah wafat, dia pasti akan digantikan oleh Nabi yang lain, Sementara tidak ada Nabi setelahku. dan yang ada adalah para khalifah, jumlah mereka pun banyak." Mereka bertanya: 'apa yang Anda perintahkan kepada kami?' Beliau menjawab: "Tunaikanlah bai'at kepada mereka, satu demi satu dan berikanlah kepada mereka hak mereka, karena Allah akan menanyai mereka atas apa yang Dia pertanggungkan pada mereka." (Bukhari, Sahih, #3455 dan Muslim, Sahih, #4750)

Di seputar dunia Muslim beberapa ulama rusak telah membajak Islam untuk tujuan politik mereka sendiri. Mereka telah memanfaatkan perasaan tulus yang dimiliki masyarakat terhadap Islam untuk mendapat pengaruh politik dan telah menjerumuskan mereka dan para ulama mukhlis lainnya. Para individu itu yang berusaha untuk menampilkan citra bahwa merekalah pihak yang mengurus kepentingan Islam pada faktanya tidak berbeda dengan para politisi rusak yang menghuni sistem politik gagal yang sama. Para "agamawan" itu menggunakan Islam untuk berkuasa tapi mengabaikan Islam sekiranya mereka telah mendapatkan jabatan, memilih menggunakan sistem gagal sekular yang sama sebagaimana politisi lain. Dalam Khilafah hal ini tidak akan terjadi karena tidak ada seorangpun, ulama atau bukan, mampu mencapai kekuasaan dengan "memanfaatkan" Islam tapi mengabaikan Islam setelah mereka berkuasa. Menerapkan

Islam adalah syarat kekuasaan dan ditegakkan juga oleh peradilan Negara. (Lebih rinci rujuk "Accountability in the Khilafah," Khilafah.com)

14. Siapa yang boleh jadi Khalifah?

Politik di seputar dunia Muslim malangnya saat ini berdasarkan kepribadian ideologi lain dan dalam beberapa kasus dikendalikan oleh para diktator dan keluarganya atau kroninya. Selain mereka tidak ada yang boleh memimpin hingga kepalanya mati, diasingkan atau dipenjara. Dalam situasi semacam itu pemerintahan biasanya langgeng di tangan keluarga seperti warisan. Dalam Islam, tidak ada budaya politik pewarisan kekuasaan sehingga siapapun tanpa pandang latar belakang ekonomi, sosial atau keluarga bisa secara sah menduduki kursi kepemimpinan. Kriteria Islam bagi Khalifah adalah bahwa Khalifah harus Muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, memiliki integritas, merdeka dan mampu. (Lebih rinci rujuk "Ruling system of Islam" Hizb ut-Tahrir)

15. Apakah masa jabatan Khalifah tertentu?

Tidak ada masa tertentu yang membatasi Khalifah. Mahkamah Mazalim bisa menyingkirkan seorang khalifah kapanpun, jika dia melanggar kontrak kekuasaan konstitusional (bai'at) atau menyalahi syarat kualifikasi untuk memerintah. Kontrak bai'at tidak terbatas oleh waktu dan pertanggungjawaban tidak terbatas tiap empat atau lima tahun melalui kotak suara. (Lebih rinci lihat "Accountability in the Khilafah," Khilafah.com)

Tanpa batasan masa jabatan, Khalifah bisa fokus pada perencanaan strategis jangka panjang bukan jangka pendek dari satu pemilu ke pemilu berikutnya sebagaimana kita temukan di sistem demokrasi. Itu juga mencegah kepentingan korporat dari membajak agenda pemerintahan melalui sumbangan kampanye yang harus diusahakan oleh para kandidat presiden atau partai untuk mencapai dan mengamankan kursi kekuasaan demokrasi. (Lebih lanjut lihat "Democracy in Crises - How the Islamic Political System ensures Good Governance," Hizb ut-Tahrir Britain)

16. Bagaimana struktur Khilafah?

Khilafah adalah sistem pemerintahan yang unik, berdasarkan teks Islam. (Lebih rinci rujuk "The Institutions of state in the Khilafah in ruling and administration," Hizb ut-Tahrir) Banyak rincian Khilafah diambil dari tindakan Nabi Saw. dan para Sahabat setelah Beliau. Negara Khilafah terdiri dari institusi berikut ini:

1. Khalifah
2. Mu'awin Tafwidh
3. Mu'awin Tanfidz
4. Para wali
5. Amir ul-Jihad
6. Departemen keamanan dalam negeri
7. Departemen urusan luar negeri
8. Departemen industri
9. Peradilan
10. Departemen urusan dalam negeri (Pelayanan Sipil)
11. Baitul Mal (keuangan negara)
12. Departemen informasi
13. Majelis Umat

17. Bagaimana Khalifah dimintai tanggung jawab?

Khalifah tidak akan punya kemewahan kebal hukum sebagaimana banyak penguasa di dunia Muslim saat ini. Khalifah tidak berhak memberhentikan atau mengangkat para hakim (untuk kepentingan pribadinya) di saat terjadi investigasi terhadap Khalifah. Ini artinya Khalifah akan dimintai tanggung jawab melalui beberapa metode, yang akan tersedia bagi masyarakat.

Islam memiliki kelengkapan rinci untuk memastikan tanggung jawab khalifah dan jajarannya. Akuntabilitas dalam Islam dijamin melalui berbagai institusi pemerintahan, kewajiban mendirikan partai politik, melalui kewajiban individu atas semua warga untuk *amar ma'ruf nahi munkar*, media massa yang aktif dan sistem peradilan berdedikasi yang akan memonitor aktivitas Khalifah dan punya kekuatan untuk menyingkirkannya

dari jabatan jika ditemukan bersalah. Selain itu, terdapat berbagai mekanisme dalam Islam yang bertindak sebagai perimbangan dan pengikat dan pengatur sang pemimpin. (Lebih rinci rujuk "Accountability in the Khilafah," Khilafah.com)

18. Bagaimana seorang Khalifah bisa diminta tanggung jawab ketika dia punya semua kekuasaan?

Islam tidak memberi Khalifah semua kekuasaan. Faktanya terdapat banyak perimbangan yang nyata mengikat dan memagari Khalifah. Islam memberi Khalifah banyak kekuasaan tapi mengikatnya dengan berbagai mekanisme. (Lebih rinci rujuk "Accountability in the Khilafah," Khilafah.com)

Syarat-syarat utama Bai'at adalah bahwa Khalifah memenuhi tujuh syarat wajib jabatannya dan untuk menerapkan Syari'ah atas warga Khilafah. Tujuh syarat wajib itu jika terlanggar Khalifah, wajib dia dicopot. Bai'at adalah sebuah kontrak dan oleh karenanya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi Khalifah, sepanjang ketentuan ini tidak menyalahi ketentuan umum kontrak bai'at. Khalifah bisa diikat dengan proses konstitusional tertentu seperti adanya Majelis Umat dan peradilan sebagai perimbangan bagi kekuasaan Khalifah.

Khalifah memiliki banyak kekuasaan seperti mengangkat para gubernur/wali dan amil, membangun kebijakan luar negeri dan menerima duta besar asing. Namun dia terikat dan tidak bisa melampaui batasan. Peran Khalifah terbatas pada ranah publik sehingga dia tidak boleh mengganggu kehidupan pribadi warga negara. Jadi sementara Khalifah memegang semua kekuasaan pemerintahan dalam Khilafah, kekuasaannya terikat dengan Syari'ah.

19. Bisakah Khalifah dicopot?

Ya. Islam telah menetapkan independensi institusi dan independensi keputusan peradilan yang jauh melebihi apa yang terlihat di demokrasi Barat. Islam menetapkan institusi pengadilan bagi para pemimpin pemerintahan yang disebut Mahkamah Mazalim (Mahkamah Tindak Kezaliman). Ini dijalankan oleh para hakim terakreditasi dan berkemampuan tinggi (qadhi mazalim) dan diberi kekuasaan tertentu oleh Syari'ah. Ia punya wewenang untuk mencopot pejabat negara tanpa pandang tingkatannya, termasuk, yang terpenting, Khalifah jika dia nekat berjalan di luar jalur yang ditetapkan dalam Bai'at (kontrak pemerintahan).

Warga umum yang punya keluhan terhadap negara bisa mengadukannya ke Pengadilan. Apa yang unik tentang Mahkamah Mazalim, dibanding pengadilan lain, adalah bahwa Qadhi Mazalim memiliki wewenang investigasi dan tidak memerlukan seseorang yang mengadukan keluhan sebelum dia melakukan investigasi. Pengadilan ini oleh karenanya terus memonitor tindakan para pejabat negara dan hukum yang diadopsi untuk memastikan mereka semua sesuai Syari'ah dan tidak ada penindasan (mazlimah) dilakukan atas rakyat. (Lebih rinci rujuk "Ruling system of Islam" Hizb ut-Tahrir)

21. Akankah ada partai-partai politik dalam Khilafah?

Ya. Saat ini partai-partai politik di seputar dunia Muslim ada dengan tujuan satu-satunya membawa para individu mereka ke kekuasaan sehingga mereka bisa memperkaya diri melalui korupsi dengan merugikan masyarakat. Dalam pemerintahan, para politisi rusak ini membolehkan pembunuhan atas rakyat dengan membolehkan serangan pesawat drone, dan menjangkitkan kemiskinan atas masyarakat melalui sikap abai dan korupsi (dalam sistem pemerintahan yang memang kufur dan merusak). Dalam Islam, politik didasarkan pada mengurus urusan rakyat dan dengan menerapkan Syari'ah Islam. Kehidupan, keimanan, keamanan, kehormatan, martabat dan harta rakyat adalah vital dalam politik Islam dan partai siapapun yang terbukti bekerja berkebalikan dengan sasaran-sasaran ini tidak akan dibolehkan. (Lebih rinci rujuk "Ruling system of Islam" Hizb ut-Tahrir)

22. Bagaimana Khilafah mengatasi korupsi?

Perkara korupsi adalah bahwa ia diternak oleh sistem politik dan para penguasanya saat ini. Dengan mendirikan sistem politik yang akuntabel di mana legislasi semacam kekebalan hukum bagi presiden tidak bisa ditetapkan, Negara Islam akan memastikan bahwa kejujuran dan integritas terjaga pada level tertinggi Negara. Dengan mengikuti contoh Nabi Muhammad Saw. dan menerapkan hukuman kepada yang kaya dan yang miskin, korupsi terberantas karena semua tingkat sosial masyarakat melihat bahwa kejujuran dihargai dan ditegakkan dalam sistem politik, mulai dari Khalifah sendiri hingga para pegawai administrasi lokal.

(Lebih rinci rujuk "Manifesto: Pakistan, Khilafah and the unification of the Muslim world" Hizb ut-Tahrir wilayah Pakistan)

Islam memisahkan uang dan politik sebagai cara untuk menghentikan korupsi. Dalam Islam khalifah bukanlah pegawai yang menerima gaji, karena dia tidak dipekerjakan oleh Umat. Meski dia tidak diberi gaji, dia diberi santunan dari baitul mal untuk memenuhi kebutuhannya. Santunan ini ada karena dia terus sibuk dengan kewajiban Khilafah dan tidak bisa mencari nafkah dan mengejar kepentingan bisnis. Besaran santunan ini ditentukan oleh Majelis Umat melalui syuro (musyawarah). Mereka adalah para wakil Umat terpilih. Menjadikan Majelis Umat sebagai penentu besaran santunan ini juga mencegah korupsi oleh Khalifah. (Lebih rinci rujuk "Ruling system of Islam" Hizb ut-Tahrir)

23. Bagaimana Khilafah memastikan keadilan?

Islam memastikan keadilan melalui penerapan Islam keseluruhan bukan dengan penghukuman saja. Akuntabilitas negara didasarkan pada: (1) peradilan independen yang juga memiliki kekuasaan untuk menyingkirkan kepala negara, (2) hak individu untuk menyatakan kebenaran dan meminta tanggung jawab semua kantor atau badan negara, (3) keharusan adanya minimal satu partai politik dan (4) adanya Majelis Umat yang juga memiliki tugas meneliti dan meminta tanggung jawab dalam hal kebijakan negara, keuangan, dan pembuatan keputusan.

Para individu punya hak untuk meminta tanggung jawab siapapun aparat atau pegawai negara, tanpa pandang pangkat atau senioritas, termasuk kepala negara. Komplain bisa diajukan ke Mahkamah Mazalim yang akan memulai proses validasi dan mengikuti proses lengkap dalam menetapkan fakta-fakta. Mahkamah ini juga punya wewenang untuk memberi hukuman. Tiap individu, Muslim dan non-Muslim, dibolehkan dan berhak mengadakan aksi dan protes damai. Mereka juga dibolehkan mencari dukungan dengan sesama warga untuk mewakili mereka terhadap negara.

Perlu diketahui bahwa kepemimpinan yang sedang melanda dunia Muslim saat ini bukanlah produk dari Islam, tapi justru muncul karena tidak terapnya Islam dalam kehidupan, mereka telah menggusur sistem Islam yang bersejarah panjang penuh kestabilan yang memiliki mekanisme untuk mencegah otoritarianisme. Pandangan keliru bahwa kekacauan dunia Muslim adalah karena Islam itu sendiri adalah pandangan yang disebarkan oleh kaum orientalis mengenai pemikiran kaum Muslim dan mengenai hukum dan teologi Islam. Pandangan keliru itu jelas gagal mengenali bahwa para Mubarak, Saddam, dan Gaddafi di muka bumi sebenarnya adalah produk cara pikir sekular, yang menyingkirkan Islam dari jalannya negara. Mereka tak ingin bebas dari penjajah dan terus menancapkan berbagai kepentingan Barat di wilayahnya. Islam akan membebaskan penduduk berbagai wilayah dari bercokolnya politik otoritarian.

Sistem pemerintahan Islam ketika diterapkan bisa memastikan setiap orang mendapatkan haknya sehingga penerapan Islam adalah yang akan memastikan keadilan. (Lebih lanjut lihat "Accountability in the Khilafah," Khilafah.com)

24. Apakah Khilafah punya aparat intelijen?

Aparat keamanan di dunia Arab saat ini terkenal akan metode brutal penyiksaan, seringkali merekalah satu-satunya garis pertahanan bagi para penguasa di wilayah itu. Sementara Barat menggunakan nilai kebebasan dan individualisme untuk menyatukan masyarakat, para penguasa Muslim menggunakan aparat keamanan untuk menjaga posisi kekuasaan mereka. Keberhasilan mereka bisa diketahui ketika AS mulai menyewa jasa penyiksaan mereka melalui program 'penyerahan tahanan ke negara lain untuk disiksa' (*extraordinary rendition*).

Khilafah akan punya aparat keamanan tapi sangat berbeda perannya. Islam mengharamkan memata-matai warga, perkara ini bukan sesuatu yang bisa diubah oleh siapapun, atau oleh karena situasi keamanan nasional apapun. Cakupan, penggunaan dan wilayah hukum aparat penegak hukum dalam Islam adalah terikat sebagaimana dinyatakan dalam banyak Hadits. Aparat keamanan dalam negeri tidak punya wewenang atau hak untuk memata-matai atau menyelidiki keyakinan pribadi rakyat. Jika dibolehkan maka akan berakibat mendapatkan bukti melalui cara sembunyi-sembunyi, memata-matai dan melanggar privasi

warga negara. Privasi rumah dan warga adalah haram dilanggar. Wilayah hukum mereka yaitu menegakkan hukum dalam negara, hal ini adalah dalam perkara publik. (Lebih lanjut lihat "The institutions of state in the Khilafah in ruling and administration," Hizb ut-Tahrir)

Hukum

Dalam Khilafah keadilan diperoleh dengan adanya peradilan independen dan hukum-hukum tetap, sehingga semua warga tahu posisinya.

Tidak seperti Kapitalisme, Islam menceraabut korupsi dengan secara sempurna memisahkan antara uang dan politik.

Pandangan Khilafah terhadap perlindungan masyarakat dan pencegahan kezaliman sangat berbeda jika dibandingkan dengan Barat.

Dibutuhkan pembuktian dengan sejelas-jelasnya sebelum hukuman apapun diberikan, inilah bagaimana Islam memastikan bahwa hanyalah mereka yang bersalah yang dihukum.

Prinsip hukum dalam Islam -berdasar sebuah hadits- adalah lebih baik membebaskan seseorang yang mungkin saja bersalah (dengan bukti yang meragukan) daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah (dengan

25. Apakah Khilafah punya konstitusi?

Sebenarnya tidak ada kewajiban untuk memiliki sebuah konstitusi yang menggariskan arah kebijakan tertentu bagi pemimpin negara. Namun karena kaum Muslim tidak hidup dalam Khilafah selama berpuluh tahun dan dengan menyebarnya budaya Barat di sekeliling tanah Muslim, maka akan berguna dituliskannya prinsip-prinsip dasar yang akan diikuti sebagai petunjuk umum dalam sebuah konstitusi, ini akan memperkuat negara dan masyarakat. Setiap pasal dalam konstitusi adalah dari teks Islam. (Lebih lanjut lihat "Introduction to the Constitution and the reasons which make it obligatory," Hizb ut-Tahrir)

26. Bagaimana pembagian peran peradilan dalam Khilafah?

Akan terdapat tiga jenis hakim dalam Khilafah. Hakim pertama, Qadhi Khushumat, akan menangani persengketaan di antara rakyat, dalam hal sosial maupun ekonomi. Hakim kedua, Qadhi Muhtasib, akan bertanggung jawab menyelesaikan pelanggaran hukum yang menzalimi hak-hak masyarakat. Hakim ketiga adalah Qadhi Mazalim, yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan antara rakyat dan Negara. (Lebih rinci rujuk "Institutions of state in the Khilafah" Hizb ut-Tahrir)

27. Apakah Khilafah punya hukum bunuh, bagaimana jika keputusannya ternyata keliru?

Pandangan Islam terhadap keadilan, perlindungan masyarakat dan menciptakan pencegahan kezaliman sangat berbeda jika dibandingkan dengan Barat. Islam berusaha mengatasi pelanggaran melalui dakwah masyarakat dan hukuman-hukuman pasti jika tindakan ilegal dilakukan. Namun, diperlukan bukti yang sangat jelas sebelum hukuman apapun dilaksanakan, inilah bagaimana Islam memastikan bahwa hanya yang bersalah saja yang dihukum. Prinsip hukum dalam Islam -berdasar sebuah hadits- adalah lebih baik membebaskan seseorang yang mungkin saja bersalah (dengan bukti yang meragukan) daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah (dengan bukti yang meragukan). (Lebih lanjut rujuk "Punishment system in Islam," Hizb ut-Tahrir)

28. Bukankah Hudud itu kejam?

Hudud adalah contoh sukses hukuman yang bersifat mencegah, jika diterapkan dalam sistem Islam keseluruhan. Selain itu, hukuman Hudud sangatlah berat, bukti perkara harus sangat jelas sehingga benar-benar pasti. Oleh karenanya hukuman hanya akan diberikan setelah bukti nyata telah ada. Hukuman akan dilaksanakan tanpa keraguan, karena tujuan dari hukuman itu adalah: pertama, membersihkan si pelaku (mukmin) dari dosa yang telah dilakukan dan kedua, bertindak sebagai pencegah bagi masyarakat luas dari melakukan tindak kriminal semacam itu. Dengan cara ini, Khilafah memastikan pesan yang jelas tersiar kepada para kriminal dan orang-orang rusak, sehingga tindakan mereka memang akan dikenai hukuman berat jika terbukti. (Lebih lanjut lihat "Introduction to the Constitution and the reasons which make it obligatory," Hizb ut-Tahrir)

29. Apakah Khilafah menerapkan hukum rajam bagi para pezina?

Zina menyalahi konsep hubungan khusus yang hanya boleh dilakukan antara suami dan istri. Hukuman dalam kasus ini haruslah berat untuk mencegah orang melakukannya sehingga terlindungilah pondasi dasar masyarakat - keluarga. Islam mensyaratkan adanya bukti yang juga berat untuk kasus ini yaitu terbatas pada tiga metode pembuktian, yang artinya hukuman tidak bisa dijatuhkan kecuali terbukti dengan salah satu dari tiga metode ini semata, meski ada setumpuk bukti di luar tiga metode pembuktian ini. Tiga bukti itu adalah: kesaksian para pelaku yang melakukannya, kesaksian dari 4 orang yang adil yang memberi keterangan yang sama, dan kehamilan.

Ibnu Abbas meriwayatkan, Rasulullah Saw. bersabda,
"Jika aku harus merajam siapapun tanpa bukti, aku pasti telah merajam wanita begini dan begini, karena ada yang mencurigakan dalam perilakunya," (Bukhari)

Si wanita itu menunjukkan perilaku mencurigakan mirip para pezina, tapi bukti perzinahan tidak ada baginya seperti 4 orang saksi atau pengakuan, sehingga hukuman tidak pernah dijatuhkan padanya. (Lebih lanjut lihat, 'Punishment system in Islam,' Hizb ut-Tahrir)

30. Bagaimana Khilafah menangani mereka yang murtad dari Islam?

Perkara murtad menjadi bagian hukum yang berkaitan dengan pertahanan ideologi Islam. Ideologi kapitalisme dan komunisme juga punya mekanisme untuk melindungi ideologinya masing-masing dan menangani perendahan ideologi yang dilakukan oleh warganya dengan sangat keras. Dalam konteks perlindungan terhadap ideologi inilah aturan Islam mengenai orang murtad harus dipahami.

Menganut Islam pada dasarnya adalah memasuki sebuah kontrak. Tidak boleh ada pemaksaan untuk melakukannya. Orang masuk Islam berdasarkan kehendaknya sendiri. Karena tidak ada paksaan maka keimanan berdasarkan akal yang memahami pastilah sangat kuat terutama karena seseorang yang masuk Islam tahu persis bahwa dia tidak akan bisa kembali jadi non-Islam karena ada hukuman mati - Hal ini memastikan perlunya pembuktian kebenaran akidah Islam dengan akal untuk memahami bahwa Islamlah yang benar. Hal ini juga mencegah mereka yang mencoba-coba secara publik menjadi Muslim kemudian secara publik murtad dalam rangka menyebar keraguan terhadap ideologi Islam. Tidak ada negara ideologis yang akan membolehkan ideologinya dipertanyakan dalam masyarakat karena hal ini akan melemahkan dan memungkinkan penggantian ideologi itu dengan yang lain.

Khilafah bukanlah negara totalitarian. Ia tidak memata-matai kehidupan para warganya dalam ranah pribadi yaitu dalam rumah mereka. Maka dalam Khilafah, semua warga bebas bertindak dan berpikir sekehendaknya di dalam rumahnya. Jadi dalam Khilafah jika seseorang murtad tapi merahasiakannya ataupun tidak mau mengakui Khilafah tapi merahasiakannya, negara tidak bisa menjatuhkan hukuman padanya karena si pelaku tidak pernah secara publik merendahkan ideologi Islam.

Hal ini dipahami dari memeriksa dalil-dalil Islam, perbuatan Nabi Muhammad Saw. dan perbuatan generasi para sahabat bahwa mereka yang murtad dari Islam harus dipastikan terlebih dahulu dan didakwahi, di mana bukti-bukti nyata kebenaran Islam diberikan dengan cara terbaik. Jika setelah ini mereka tidak bertobat maka mereka dijatuhi hukuman mati karena mereka berusaha merendahkan ideologi Islam. (Lebih lanjut lihat, 'Punishment system in Islam,' Hizb ut-Tahrir)

Hukuman mati bukanlah hanya ada di Islam. Hukuman mati di Amerika Serikat resmi diberlakukan oleh 38 dari 50 negara bagian. Di AS, survei-survei telah lama menunjukkan bahwa mayoritas menghendaki berlakunya hukuman mati. Survei ABC News Juli 2006 menemukan 65% setuju hukuman mati, (Lihat <http://abcnews.go.com/images/Politics/1015a3DeathPenalty.pdf>) konsisten dengan ini ada survei-survei lain sejak tahun 2000 menunjukkan separuh publik Amerika percaya 'hukuman mati masih kurang sering diterapkan.' (Lihat <http://www.pollingreport.com/crime.htm>) Di Inggris 1998, the House of Commons (parlemen) voting memberlakukan *the 6th Protocol of the European Convention on Human Rights* yang melarang hukuman mati kecuali "di masa perang atau ada ancaman perang nyata." Hari ini pemberontakan dan pengkhianatan tetap dijatuhi hukuman mati di Inggris.

31. Apakah Khilafah membolehkan penyiksaan?

Penyiksaan sepenuhnya terlarang dalam Islam, siapapun yang ditemukan bersalah melakukan serangan fisik atau penyiksaan terhadap warga negara, Muslim atau non-Muslim, akan dihukum berat. Islam melarang menjatuhkan hukuman pada seorang tertuduh sebelum tuduhan terbukti. Penyiksaan pada prinsipnya dan pada dasarnya -tanpa pandang alasan keamanan- adalah terlarang. (Lebih lanjut rujuk, 'Punishment system in Islam,' Hizb ut-Tahrir)

32. Bagaimana Khilafah menangani pemberontakan?

Terhadap pemberontakan apapun di tanah Islam, warga selalu dipandang sebagai warga oleh negara. Islam telah memberi mandat pada Mahkamah Mazalim wewenang mencopot Khalifah jika dia melanggar Islam

atau melakukan kezaliman. Kasus pemberontakan ada di luar kerangka ini. (artinya Khalifah tidak dianggap menzalimi warga yang memberontak jika dia menangani itu sesuai Syari'ah, *pent.*)

Pemberontakan dalam Islam dipandang sebagai tindakan tidak patuh dan maka si pelaku didisiplinkan. Tidak boleh bagi Khalifah untuk memerangi mereka lebih dari pendisiplinan. Dilarang menghabisi para pemberontak atau melancarkan serangan udara, dengan bom atau senjata berat, karena senjata semacam itu dipandang tidak tepat untuk hukuman pendisiplinan. Apapun yang berguna dalam perang yang sesungguhnya adalah dilarang. Siapapun dari mereka yang ditawan, akan diperlakukan sebagai pendosa/ pelanggar hukum dan bukan sebagai tawanan perang. (Lebih lanjut lihat, 'Punishment system in Islam,' Hizb ut-Tahrir)

33. Tidakkah Syari'ah mengutamakan kaum Muslim atas non-Muslim?

Tidak, perkaranya tidak seperti itu. Dari perspektif sosial, Islam memandang semua penduduk sebagai manusia bukan dipandang etnis atau rasnya. Hasilnya, semua yang tinggal di wilayah Islam dipandang sebagai warga, apapun keyakinan, warna kulit atau etnisnya. Kewarganegaraan Khilafah didasarkan pada tempat tinggal mereka bukan tempat kelahiran atau pernikahannya. Semua orang yang memegang kewarganegaraan Khilafah adalah subyek Khilafah, penjagaan dan pengurusan berbagai urusan mereka adalah tugas Khilafah, tanpa ada diskriminasi. Tiap orang yang memegang kewarganegaraan Khilafah menikmati semua hak yang telah diberikan Syari'ah pada mereka, Muslim maupun bukan. Siapapun yang tidak memegang kewarganegaraan Khilafah tidak memiliki hak-hak itu, meski dia Muslim.

Para warga non-Muslim tidak diganggu agama dan ibadah mereka. Mereka diperlakukan menurut agama mereka dalam hal makanan dan pakaian dalam kerangka umum hukum. Sengketa terkait pernikahan dan perceraian bagi non-Muslim ditangani dengan menetapkan para hakim dari antara mereka sendiri di pengadilan yang disediakan oleh Khilafah. Dalam ranah publik, Islam mewajibkan terapnya aturan-aturannya atas tiap warga Muslim dan non-Muslim tanpa pembedaan. Dengan cara ini semua warga adalah subyek aturan-aturan yang sama dalam ranah publik. (Lebih lanjut lihat "Introduction to the Constitution and the reasons which make it obligatory," Hizb ut-Tahrir)

34. Bisakah para perempuan menjadi saksi di sidang pengadilan?

Ya. Hukum pembuktian sebagaimana semua hukum Islam lainnya adalah aturan Syari'ah yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Ada dalil-dalil yang terbatas untuk kasus-kasus hak keuangan (waris). Ini karena peran perempuan utamanya sebagai ibu dan istri (meski tidak terbatas itu saja) berbeda secara relatif dengan laki-laki yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan. Ada dalil-dalil yang mengindikasikan bahwa kesaksian dari para perempuan tidak sama dengan dari para laki-laki.

Maka, kesaksian 2 perempuan sama dengan kesaksian 1 laki-laki dalam tindakan-tindakan yang terjadi di kehidupan publik. Seperti kesaksian perempuan mengenai hak-hak dan kontrak-kontrak. Kesaksian 1 perempuan diterima dalam perkara yang terjadi di komunitas perempuan, seperti kejahatan yang terjadi di toilet perempuan. Kesaksian 1 wanita dipandang mencukupi, dalam perkara yang erat dengan urusan wanita, seperti kesaksian mereka mengenai keperawanan dan perkara keibuan.

Selain dari rasio tertentu yang disebutkan mengenai kasus hak-hak finansial, tidak ada dalil yang mencegah kesaksian perempuan. Teks Islam sesungguhnya menunjukkan bolehnya para perempuan untuk bersaksi dan bahkan mengindikasikan bolehnya kesaksian seorang perempuan saja. (Lebih lanjut lihat 'The rules of testimonial evidences,' hal.29-32, Hizb ut-Tahrir)



Masyarakat

Islam tidak mengenal istilah minoritas dalam hal non-Muslim di dalam Khilafah. Islam telah merinci pendiriannya terhadap kelompok agama non-Muslim dan punya konsep "ahl udz-dzimmah" (kaum dengan perjanjian), istilah yang mengandung tanggung jawab moral yang tidak tampak dalam istilah minoritas. Kata dzimmah berarti perlindungan, yaitu "perjanjian, perlindungan, jaminan, kesucian dan tugas."

35. Bagaimana Khilafah memandang kaum minoritas?

Islam tidak mengenal istilah minoritas dalam hal non-Muslim di dalam Khilafah. Islam telah merinci pendiriannya terhadap kelompok agama non-Muslim dan punya konsep "ahl udz-dzimmah" (kaum dengan perjanjian), istilah yang membawa tanggung jawab moral yang tidak tampak dalam istilah minoritas. Kata dzimmah berarti perlindungan - sebagaimana dalam hadits dalam Sunan Abu Dawud - "*yang terendah (dari kaum Muslim) membawa perlindungan mereka.*" Dalam kamus klasik Lisan ul-Arab, dzimmah diartikan sebagai "perjanjian, perlindungan, jaminan, kesucian dan tugas." (Lebih lanjut lihat, "Introduction to the Constitution and the reasons which make it obligatory," Hizb ut-Tahrir)

Ada banyak hukum yang ditetapkan Islam bagi ahl udz-dzimmah, itu termasuk:

- Non-Muslim tidak diganggu keyakinan dan ibadahnya
- Non-Muslim diperlakukan dalam hal makanan dan pakaian menurut agama mereka (dengan perincian tertentu).
- Perkara pernikahan dan perceraian ditangani di antara non-Muslim menurut agama mereka.
- Khilafah menerapkan aturan Syari'ah dalam area seperti kontrak-kontrak, sanksi, kesaksian, pemerintahan dan ekonomi secara sama atas Muslim maupun non-Muslim.
- Jizyah dipungut terhadap non-Muslim laki-laki dewasa di wilayah Islam yang mampu membayarnya, itu adalah pembayaran bertingkat yang bisa ditetapkan berbeda-beda tingkatan berdasarkan kekayaan mereka. Itu adalah janji di mana negara bertanggung jawab atas keamanan, kehidupan, harta, keyakinan dan kehormatan para non-Muslim. Ahl udz-dzimmah di dalam wilayah Islam akan dipilih ke Majelis Umat dan punya hak untuk menyuarakan permasalahan mereka mengenai penyimpangan penerapan hukum Islam atas mereka.

36. Bagaimana Khilafah mengatasi sektarianisme?

Konflik-konflik sektarian dan etnis di dunia Muslim saat ini biasanya dikompromi oleh partai-partai politik demi kepentingan mereka sendiri, karena mereka berusaha mengeksploitasi rakyat dengan sistem politik yang gagal memberikan layanan dan pemenuhan kebutuhan. Partai-partai politik itu menggunakan kekuasaan untuk mendorong perbedaan-perbedaan itu bagi kelestarian mereka sendiri dengan menjalankan politik secara sektarian. Hal ini mengakibatkan kelumpuhan dalam pemerintahan, tidak bisa membuat keputusan-keputusan penting dan muncul konflik di jalanan.

Khilafah, yang dibangun berdasarkan Islam dan bukan nasionalisme, kesukuan atau bentuk lain ashobiyah pemecahbelahan, akan memandang semua warga sebagai Umat Muslim dan non-Muslim yang terlindungi. Ia akan berusaha memberikan pelayanan dan pembangunan secara tanpa bias kepada semua rakyat berdasarkan pemahaman ini. Karena rakyat mulai melihat usaha-usaha tulus dilakukan untuk menangani problem-problem mereka, maka hal ini akan meminimalkan ketegangan dan juga menghilangkan momentum bagi organisasi milisi antek asing.

Islam membolehkan adanya perbedaan dalam sebagian aspek hukum. Ini bukanlah hal baru dan faktanya menjadi sesuatu yang menghasilkan perkembangan pemikiran Islam, fikih dan ushul di masa lalu. Ikhtilaf bisa ada atas sejumlah perkara namun perbedaan tidak boleh ada dalam perkara dasar seperti adanya Allah Swt., para Malaikat, Kitab-Kitab, Surga dan Neraka dan sebagainya. Oleh karena itu ada yang qath'i - dalil yang pasti dan ada yang tidak pasti. Apapun madzhab seseorang, sekte atau kelompok, yang diadopsi pendapatnya, harus berdasarkan dalil-dalil dan dalil-dalil itu tidak boleh bertentangan dengan dalil yang sepenuhnya qath'i. Jika hal ini dipenuhi maka seseorang boleh mengambalnya sebagai pendapat karena itu didasarkan dalil Islami, bahkan jika orang lain menilainya lemah. Ini karena pendapat apapun yang punya dalil dan tidak bertentangan dengan dalil qath'i adalah pendapat Islami. Khilafah tidak akan menetapkan

pandangan mengenai aqidah ketika semua kelompok agama yang mengaku Islam di seantero tanah Islam punya aqidah yang sama. (Lebih rinci lihat, "Islamic State," Hizb ut-Tahrir)

37. Bagaimana Khilafah menyikapi Syi'ah?

Perpecahan Sunni-Syi'ah telah menjadi tema berulang dalam sejarah Islam. Dari perang-perang berdarah hingga gerakan pemisahan yang saling menuding kufur. Bagi Barat perpecahan ini digunakan sebagai dalih bahwa konsep satu Umat itu kuno dan Islam tidak mampu menangani perbedaan sektarian. Dengan memeriksa banyak peristiwa tragis yang mengakibatkan perpecahan nampak bahwa Sunni dan Syi'ah punya pendirian yang sama terhadapnya.

Khilafah tidak akan memandang Syi'ah dari perspektif emosi atau sejarah, karena itu semua tidak berguna dalam proses penggalian hukum. Faktanya, bahkan melihat fikih dari perspektif Sunni atau Syi'ah tidaklah tepat karena duduk perkaranya adalah apakah Islam membolehkan pengadopsian sebuah pendapat tertentu atau tidak. Kerangka untuk melihat perbedaan ini adalah apakah sumber hukum Islam membolehkan pengadopsian suatu pendapat dan bukan apakah suatu pendapat itu diambil dari fikih Sunni atau Syi'ah.

Pendapat-pendapat Syi'ah terhadap politik dan pemerintahan selama *ghaybah*, telah menjadi titik perdebatan di antara para ulama Syi'ah selama berabad-abad. Apa yang ada hari ini dalam hal *Wilayat ul-Faqih*, yaitu seorang penguasa yang mujtahid haruslah jadi penguasa, adalah respon terhadap fakta bahwa sistem Islam tidak bisa ditunda selama *ghaybah*. Maka terdapat banyak pendapat tentang politik dan pemerintahan di antara Syi'ah.

Maka selain perbedaan tentang kualitas siapa yang harus memerintah, Syi'ah realitanya adalah sebuah madzhab, sebagaimana banyak madzhab yang ada. Maka selama sebuah madzhab tidak menyalahi dalil qath'i, dia akan diperlakukan dengan aturan Islam terkait. Maka siapapun yang menganggap Imam Ali ra. adalah seorang nabi berarti bertentangan dengan dalil-dalil qath'i dalam Qur'an, demikian pula mereka yang menganggap Imam Ali sebagai sang pencipta: mereka telah dibunuh karena murtad oleh Ali ra. sendiri. (Lebih lanjut lihat 'Islamic State,' Hizb ut-Tahrir)

38. Bagaimana Khilafah bisa berfungsi padahal ada banyak perbedaan di antara kaum Muslim?

Problem di tanah Muslim adalah karena perbedaan semu, semacam garis batas negara kebangsaan, bendera nasional, lagu nasional, dan nasionalisme. Banyak perbedaan yang ada bukan pada keyakinan umat, tapi pada perkara dan pendapat kecil. Problem-problem muncul ketika tidak ada mekanisme dan kekuasaan sah untuk menangani perbedaan, khususnya terkait kehidupan masyarakat dan publik, sehingga menghasilkan kebingungan dan konflik.

Dunia Muslim perlu kekuatan pemersatu, yang telah gagal diciptakan oleh 52 negara kebangsaan di atas tanah Muslim. Penerapan Islam akan bertindak sebagai faktor pemersatu yang kuat, yang akan menembus batas-batas palsu. Saat ini para penguasa Muslim yang ada bermain atas perbedaan-perbedaan itu untuk menjaga agar Umat terpecah-belah dan dalam rangka menghentikan oposisi terhadap kekuasaan mereka.

Dalam Khilafah, Khalifah adalah penyelesai perkara dalam semua urusan, dan semua persengketaan diajukan kepadanya untuk diputuskan. Karena Khalifah punya wewenang dari Islam untuk mengadopsi dan menerapkan pendapat Syari'ah atas masyarakat, tidak ada konflik yang bisa muncul karena semua pihak diwajibkan oleh Islam untuk mematuhi perintah Khalifah. Mekanisme ini tidak ada di dunia Muslim saat ini, itulah yang menjadi akar masalahnya. (Lebih rinci rujuk "Islamic Personality Vol I" Hizb ut-Tahrir)

39. Akankah Khilafah membangun masyarakat berdasarkan 'kesetaraan'?

Semua aturan Islam diterapkan atas Muslim dan non-Muslim tanpa kecuali. Dengan cara ini Islam mencapai keadilan dengan menerapkan aturan yang sama atas tiap orang.

Hari ini konsep kesetaraan masih menjadi tolok ukur untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita dan menjadi alat bagi hak-hak wanita. Dari perspektif sejarah, bobot yang besar telah diberikan pada diskusi seputar 'kesetaraan', dan pada arti khusus telah diterima, oleh para penulis Barat.

Problem pemahaman Barat tentang kesetaraan sesungguhnya ada dalam pemikiran bahwa tidaklah laki-laki maupun perempuan ada di bawah salah satunya. Kesetaraan mengharuskan persamaan antar jender dan itu dianggap memperbaiki kesalahan dalam sejarah. Ia meninggalkan banyak pertanyaan tak terjawab. Ia tidak membahas bagaimana cara terbaik laki-laki dan perempuan bisa bekerjasama untuk menguatkan masyarakat sehingga kohesif. Dalam konteks yang lebih luas kesetaraan itu sendiri sangat terbatas dalam menangani perselisihan dan mengatur hubungan yang muncul di antara orang. Ide sederhana kesetaraan manusia tidak memberi petunjuk bagi perkara perbedaan dan fakta ini memunculkan perlunya tambahan rincian, ide-ide dan prinsip-prinsip.

Perbedaan laki-laki dan perempuan memunculkan kebutuhan khusus dan perselisihan rumit, yang pengaturannya akan menjadi elemen utama dalam memastikan kohesi sosial. Kegagalan apapun dalam memahami atau mengatur kebutuhan dan perselisihan ini gara-gara ide kesetaraan akibatnya bisa fatal. Bukannya menggariskan hak-hak laki-laki dan hak-hak perempuan, kesetaraan memandang hak-hak perempuan adalah apa yang menjadi hak-hak laki-laki – padahal pandangan itulah yang menjadi masalah. (Lebih lanjut lihat 'Does Islam oppress Women,' Khilafah.com)

40. Apa peran perempuan dalam Khilafah?

Di sekeliling dunia hari ini, peran perempuan menjadi terbagi. Dua ujung telah berkembang di mana di satu sisi sebagian perempuan tertindas haknya dalam hal pernikahan, pendidikan, kepemilikan dan pekerjaan sementara di sisi lain sebagian perempuan dieksploitasi sisi seksualitasnya oleh para sekular liberal di balik topeng modernitas. Kedua situasi itu melanda di tanah-tanah Muslim karena infiltrasi budaya seksual Barat, ditambah dengan budaya kesukuan atau tradisi.

Dalam Khilafah, peran utama perempuan adalah bahwa dia ibu dan bertanggung jawab atas rumah tangganya dan dia adalah kehormatan yang harus dilindungi. Perempuan akan menempati kehormatan dan martabat karena sistem pendidikan dan peradilan memastikan perempuan percaya diri dan menjadi anggota aktif masyarakat dan mampu sepenuhnya menggunakan semua hak yang diberikan pada mereka oleh Islam, tanpa dipapar ke eksploitasi atau pengekangan.

Selain itu dia bisa berkontribusi apapun pada masyarakat dan juga didorong untuk menjadi anggota aktif masyarakat dalam semua ranah seperti pendidikan, politik maupun ekonomi. (Lebih rinci rujuk "Social System in Islam" Hizb ut-Tahrir)

41. Hak-hak apa yang diberikan Khilafah pada perempuan?

Al-Qur'an dan hadits telah jelas menggariskan hak-hak perempuan, yang telah tetap dan tidak bisa diubah, diamandemen atau direformasi, itu termasuk:

- hak mewarisi
- hak menggunakan nama keluarganya
- hak pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan
- hak memilih calon suami
- mendapat mahar
- hak berpolitik
- menduduki sejumlah posisi dalam negara
- mendapat pendidikan
- bekerja
- menjadi karyawan
- menjalankan bisnis
- ber-syirkah menginvestasikan kekayaannya

Semua hak itu menjadi tugas Khilafah untuk melindunginya.

42. Apakah perempuan dibolehkan bekerja di dalam Khilafah?

Perempuan dibolehkan bekerja di bidang apapun yang mereka pilih. Islam telah membolehkan perempuan mencari kerja, menjalankan bisnis, mempekerjakan orang dan berinvestasi. Para perempuan bisa memilih profesi apapun seperti insinyur, dokter, pekerja sosial, guru, aktivis politik dan ilmuwan, dsb. (Lebih rinci rujuk "Systems of Islam" Hizb ut-Tahrir)

44. Apakah laki-laki dan perempuan boleh bekerjasama?

Ya. Islam membolehkan laki-laki dan perempuan berinteraksi untuk tujuan perdagangan, bekerja dan jual-beli. (Lebih rinci rujuk 'Social system in Islam,' Hizb ut Tahrir)

44. Apakah perempuan dipaksa berhijab?

Khilafah hanya akan menerapkan apa yang pasti dari teks Islam. Persyaratan minimum menurut ayat Qur'an dan Ahadits bagi perempuan di kehidupan publik adalah bahwa seluruh tubuh harus tertutup dengan pengecualian wajah dan kedua tapak tangan. Lebih dari ini adalah pilihan bagi tiap individu, menjadi perbedaan pendapat di antara ulama dan perkara di mana individu dibebaskan untuk mengadopsi suatu pendapat. (Lebih rinci rujuk "Social System in Islam" Hizb ut Tahrir)

45. Apakah perempuan non-Muslim dipaksa berhijab?

Non-Muslim diperlakukan dalam hal makanan dan pakaian menurut agama mereka (dengan perincian tertentu). (Lihat 'the Introduction to the Constitution and the reasons which make it obligatory,' Article 7, d. Hizb ut-Tahrir)

46. Apa kebijakan pendidikan Khilafah?

Khilafah akan menyediakan pendidikan Islam yang mengkombinasikan sains dan spiritual, ideologi dan praktek. Khilafah akan berusaha mendidik rakyatnya dengan cara yang membangun individu menjadi utuh, yang siap berpartisipasi dalam semua area masyarakat. Langkah pertama untuk visi ini adalah penetapan kurikulum tunggal terpadu untuk diterapkan di seantero institusi pendidikan yang dikembangkan bebas dari interferensi kekuatan kolonial dan orang-orang yang tidak ahli.

Sasaran kebijakan pendidikan Khilafah adalah membangun Kepribadian Islam (aqliyah dan nafsiyah) dengan menanamkan Islam dalam hati dan pikiran siswa dan menyiapkan mereka (generasi masa depan) untuk menjadi ilmuwan, para ahli dalam semua bidang kehidupan (tsaqofah Islam dan iptek) sehingga mereka menjadi para Ulama dan ahli yang akan memimpin Umat untuk menjadi umat pemimpin. (Lebih rinci rujuk "The Khilafah's Education Policy" Khilafah.com)

47. Apakah Khilafah membolehkan pendidikan bagi perempuan?

Ya, perintah Islam untuk mendapat pengetahuan ditujukan bagi laki-laki dan perempuan. (Lebih rinci rujuk "The Khilafah's Education Policy" Khilafah.com)

48. Apakah laki-laki harus berjenggot?

Tidak. Ini adalah perkara yang menjadi perbedaan pendapat para ulama dan individu bebas mengadopsi salah satu pendapat bagi dirinya. (Lebih rinci rujuk "Islamic Personality Vol I" Hizb ut Tahrir)

49. Apakah Khilafah membolehkan media massa independen?

Ya. Media dalam semua bentuknya harus bebas terlibat dalam diskusi dan debat dalam semua perkara, di dalam ranah standar yang ditetapkan Islam. (Lebih rinci rujuk "The Institutions of State in the Khilafah" Hizb ut Tahrir)

50. Bagaimana nasib film dan hiburan dalam Khilafah?

Film dan hiburan dibolehkan dalam Islam, isinyalah yang harus diatur. Semua bentuk media dan hiburan harus menaati aturan Islam. Elit politik saat ini di seantero dunia Muslim, nantinya harus belajar menjalani hidup tanpa prostitusi, perjudian dan meja minuman keras. (Lebih rinci rujuk "Systems of Islam" Hizb ut Tahrir)

51. Apakah seni dilarang?

Seni dan budaya menunjukkan tingkat intelektual dan arah ideologi masyarakat. Oleh karena itu, mereka sangatlah penting dalam meneguhkan negara yang sadar dan percaya diri. Mereka adalah alat penting dalam membantu menciptakan kesadaran akan identitas dan persatuan di antara rakyat, sementara itu juga menyebarkan visi ke luar negeri. Maka seni akan diberi perhatian khusus oleh Khilafah dan didukung dengan bermacam cara, namun karena potensi area semacam ini, perhatian penuh akan diberikan untuk memastikan bahwa semua karya sesuai dengan aturan Islam. (Lebih rinci rujuk "The Khilafah's Education Policy" Khilafah.com)

52. Akankah Khilafah berpartisipasi dalam kancah olahraga internasional semacam Olympics?

Olahraga dibolehkan dalam Islam dan oleh karenanya mengikuti kancah olahraga internasional dibolehkan. Mengirim tim untuk berpartisipasi mewakili Khilafah dipertimbangkan berdasar prioritas negara. (dengan mengikuti Syari'ah yang rinci termasuk dalam hal kebijakan luar negeri)

53. Apakah Khilafah akan melarang internet?

Tidak. Islam tidak melawan kemajuan sains dan teknologi. Sejarah Khilafah telah menunjukkan kaum Muslim selalu terdepan dalam teknologi dan sains. Khilafah tidak hanya akan menggunakan internet tapi juga semua perkembangan teknologi. (Lebih lanjut lihat 'Islam in the 21st century,' Khilafah.com)

Ekonomi

A nighttime photograph of a city skyline. In the foreground, a multi-lane highway interchange is illuminated with warm orange and yellow lights, showing light trails from moving vehicles. To the right, a prominent building with a large, illuminated dome and minaret, resembling a mosque, stands out. The background is filled with various skyscrapers and city buildings, their lights reflecting against the dark night sky.

Sistem ekonomi Islam berfokus pada bagaimana mendistribusikan kekayaan bukannya pada cara bagaimana kekayaan diproduksi. Islam memandang produksi sebagai perkara sains yaitu melalui penelitian dan eksperimen maka produksi bisa ditingkatkan.

Sasaran sistem ekonomi Islam adalah memastikan kebutuhan dasar semua warga terpenuhi; Islam menjadikan sasaran ini sebagai perkara utama dalam sistem ekonomi. Sasaran ekonomi digariskan oleh Nabi Muhammad Saw.: *"Anak Adam tidak punya hak lebih baik dari memiliki sebuah rumah di mana dia tinggal dan sepotong pakaian di mana dia menutupi telanjangnya dan*

54. Apa perbedaan antara sistem ekonomi Khilafah dan sistem Kapitalis?

Dalam Kapitalisme Kebebasan kepemilikan mendorong orang mengejar aktivitas ekonomi demi kepentingan pribadi. Pasar bebas berdasarkan kebebasan kepemilikan menentukan produksi dan konsumsi barang dan jasa. Dalam Islam kepemilikan pribadi dan publik menentukan produksi. Harga dan upah menjadi insentif untuk produksi dan konsumsi. Redistribusi dan sirkulasi kekayaan adalah kunci untuk mengentaskan kemiskinan.

55. Bisakah Khilafah mengatasi perkara ekonomi modern yang dihadapi dunia?

Pengentasan kemiskinan, penciptaan kekayaan, pertumbuhan langgeng dan distribusi kekayaan yang adil adalah beberapa tantangan utama perekonomian global hari ini. Realitasnya adalah manusia ingin memiliki barang dalam rangka hidup - Islam menjelaskan apa yang bisa dimanfaatkan dan apa yang tidak, ketentuan demikian ini banyak yang bisa diterapkan melalui analogi dan menjadi solusi bagi realitas baru. Kepemilikan benda-benda terus berjalan dinamis, maka perlu ada transaksi dan kontrak baru, Islam menjelaskan mana yang dibolehkan untuk meningkatkan kekayaan, dan cara-cara itu bisa digunakan selamanya. Inilah yang membuat Islam bisa diterapkan hari ini dan berposisi mengatasi masalah modern. (Lebih lanjut lihat "Islam in the 21st Century," Khilafah.com)

56. Apa pandangan Khilafah terhadap perkembangan teknologi dan sains modern?

Islam memandang teknologi, industri dan peralatan sebagai perkara universal yaitu adalah sesuatu yang umum bagi semua orang dan tidak berubah mengikuti keyakinan, tempat atau waktu. Islam memandang semua peralatan, teknik dan penemuan sebagai sesuatu yang bisa diadopsi karena itu bukan hasil pemikiran asing tapi hanyalah hasil kemajuan. Karena alasan ini Islam tidak hanya membolehkan pengejaran sains dan teknologi, Islam mendorong untuk itu.

Islam memandang semua material yang termasuk sains, teknologi dan industri, hanyalah studi mengenai realitas dan studi bagaimana benda bisa dimanipulasi untuk meningkatkan standar dan kondisi hidup manusia. Inilah pandangan Islam terhadap sains dan semua cabangnya.

Dalam zaman modern, teknologi memungkinkan efisiensi bagi masyarakat dan meningkatkan pola hidup. Hal ini lalu memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yang kemudian mendorong perkembangan lebih lanjut. Kebijakan Khilafah adalah mendayagunakan dan mengintegrasikan sebanyak mungkin teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupan para warganya. (Lebih rinci lihat "The Quest for progress, an Islamic economic blueprint for Pakistan," Hizb ut-Tahrir Britain)

57. Bukankah kapitalisme memonopoli kemajuan?

Sebagian besar pemikir, ilmuwan dan filosof mengklaim Islam tidak punya tempat di dunia hari ini, sebuah pandangan yang dibangun atas dasar bahwa tidak ada negeri Muslim menghasilkan apapun dalam hal penelitian sains atau penemuan teknologi. Barat mengklaim bahwa kemajuan dalam sains dan teknologi terjadi di Barat ketika Barat menyingkirkan otoritas Gereja dan memisahkan agama dari kehidupan. Bagi mereka gereja menghambat perkembangan sains dan nalar karena agama dibangun berdasarkan keyakinan dan mistik, hanya dengan dihapuskannya itu semua dari ranah publik maka Barat bisa melancarkan revolusi industri dan subur dalam Sains. Hari ini bagi para liberalis, merekalah yang menemukan Sains yang kita jumpai; mereka mengklaim merekalah yang meletakkan pondasi dan menciptakan bermacam cabang. Cerita semacam itu mengabaikan sejumlah perkembangan sejarah di luar Barat dan menunjukkan bagaimana Barat terus memandang sejarahnya sebagai sejarahnya dunia. Cerita semacam itu juga dengan

seenaknya mengabaikan apa yang Barat ambil dari peradaban yang maju lebih dahulu dan khususnya dari peradaban Islam. Sejarahnya semua peradaban dikarakterisasi dengan suatu bentuk perkembangan teknologi dan sains, Barat telah mendokumentasikan kontribusi kaum Romawi pada iptek sementara dunia Islam di abad ke-8 hingga ke-10 telah menerjemahkan karya-karya iptek kaum Yunani.

Sains sejatinya adalah studi, penelitian dan eksperimen terhadap bagian yang teramati dari alam semesta. Perkembangan mobil adalah karena perkembangan mesin berbahan bakar; inilah di mana pembakaran bahan bakar dalam sebuah mesin menggerakkan piston dan bagian lain, lalu menggerakkan mobil. Hal ini dimungkinkan sejak Kerajaan Inggris yang awalnya menggunakan mesin uap lalu batubara untuk menggerakkan piston dan kemudian menghasilkan perputaran (gerakan) untuk menggerakkan mesin. Perkembangan semacam itu didasari karya Al-Jazari di abad ke-12 di mana dia menciptakan tuas berbusur, dan menciptakan garak rotor melalui penggunaan batang dan silinder. Dialah yang pertama menggunakannya sebagai mesin.

Contoh di atas dan sejumlah contoh lain menunjukkan bahwa tidak ada peradaban yang bisa mengklaim bahwa sains sejak awal ada hanya pada mereka, sebaliknya semua peradaban memiliki kontribusi atas perkara universal ini. Fakta bahwa atom dan molekul bergerak teratur mengikuti hukum alam yang bisa dimanipulasi adalah fakta yang tetap bagi seorang Muslim, Kristen, atau Liberalis; ini adalah sesuatu yang universal dan tidak dipengaruhi oleh keimanan seseorang. Debat sebenarnya adalah peradaban yang mana yang membuat kontribusi signifikan pada sains dan apa sesungguhnya yang mendorong mereka untuk maju dalam iptek.

Para pemikir, ilmuwan, insinyur dan ahli dari kaum Muslim membuat kontribusi signifikan pada sains dan juga banyak bidang lain. Banyak dari kontribusi itu lalu digunakan Barat untuk membuat kontribusi lebih lanjut. Sifat dasar sains sebagai perkara universal artinya tidak satupun peradaban bisa mengklaim sebagai penemu sains melainkan semua peradaban telah mendokumentasikan kontribusi mereka sepanjang sejarah yang menjadi landasan bagi peradaban selanjutnya yang mengembangkannya. Sebelum kemunculan Islam di Timur Tengah, penduduknya tidak berkontribusi pada Sains, ketika kaum yang sama itu menerima Islam mereka membuat kontribusi yang digunakan generasi setelahnya untuk menemukan benda-benda baru yang hari ini masih kita temui. Islam bukannya menjadi penghalang sains, ia adalah pengarah yang mendorong kontribusi Muslim pada sains.

58. Apakah pengadopsian Ekonomi Kapitalis bukan jalan kemajuan bagi dunia Muslim?

Realitasnya pendapat ini hanyalah propaganda dari Barat. Kapitalisme mungkin dominan di era ketika perekonomian global bernilai \$60 trillion, namun kita harus mengakui capaiannya yang lain. Perekonomian dunia mungkin menghasilkan kekayaan fantastis dengan didorong demokrasi liberal, tapi separuh populasi dunia tidak punya cukup makanan hari ini karena mereka berproduksi kurang dari \$2 per hari, 95% penduduk dunia hidup dengan kurang dari \$10. (World Bank Development Indicators 2008) Kemiskinan dunia mengalami percepatan di dalam dominasi Kapitalisme.

Kesuksesan kapitalisme berikutnya adalah menciptakan kegagalan terbesar kesejahteraan dalam sejarah. Sementara mayoritas orang di dunia kelimpungan bertahan hidup dengan beberapa dollar, AS punya milyuner terbanyak, dalam perekonomian dunia yang paling timpang. Di 2006 *World Institute for Development Economics Research* PBB mengeluarkan kesimpulan sebuah penelitian global. Sejumlah temuannya sangat mencengangkan. Dengan mengumpulkan penelitian dari berbagai negara sekeliling dunia, penelitian itu menyimpulkan bahwa 1% terkaya di dunia memiliki 40% kekayaan planet ini dan hanya 10% populasi dunia memiliki 85% aset dunia. (www.iariw.org/papers/2006/davies.pdf) Richard Robbins dalam bukunya yang menang penghargaan, *'Global Problems and the Culture of Capitalism'* mengkonfirmasi hal ini ketika dia berkata: *'Munculnya Kapitalisme mewakili sebuah budaya yang dalam banyak aspek adalah yang paling sukses yang pernah diterapkan dalam hal mengakomodasi banyak individu dalam kenyamanan dan kemewahan relatif dan absolut. Namun, ia tidak sesukses itu dalam mengintegrasikan semua dalam timbangan yang sama, dan kegagalannya ini tetap salah satu problem terbesarnya.'*

Kapitalisme telah gagal dalam mendistribusikan kekayaan secara adil, perlunya untuk terus tumbuh (pertumbuhan ekonomi perpetual) menghasilkan 'Gelembung dan Kempes' dan pasar-pasar finansial telah menciptakan kekacauan karena berpikir jangka pendek. Ekonomi kapitalis menyebabkan keserakahan dan eksploitasi dan Mata Uang Kertas (Fiat) menyebabkan fluktuasi harga. (Lebih lanjut lihat 'Geopolitical myths,' Khilafah.com)

59. Adakah sektor swasta dalam Khilafah?

Karena sebagian besar penguasa di tanah-tanah Muslim gagal menyediakan pelayanan memadai bagi rakyat, hal ini telah memberi sektor swasta kondisi untuk tumbuh dalam perekonomian yang punya sedikit batasan mengenai apa yang boleh dimiliki. Ini telah mengakibatkan banyak perusahaan asing menyediakan layanan dasar bagi rakyat dan banyak industrialis dan pebisnis yang dekat dengan penguasa juga ikut meramaikan.

Islam tidaklah melawan kepemilikan dan sektor swasta. Namun Islam telah mengatur beberapa komoditas tertentu sebagai kepemilikan rakyat yang tidak dibolehkan untuk dimiliki secara pribadi. Dalam Khilafah, sektor publik bersasaran menyediakan layanan dasar yang dibutuhkan tiap orang untuk hidup secara pantas, seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak ada orang, kaya maupun miskin, dibiarkan dalam kondisi kekurangan. Sektor swasta memiliki peran penting untuk dijalankan, namun ia melengkapi sektor publik dan dibangun di atasnya, bukan berfungsi sebagai pengganti sektor publik. Perusahaan swasta akan didorong dan sistem zakat yang jelas dan tidak membebani diterapkan sehingga memungkinkan bisnis tumbuh subur. (Lebih rinci rujuk "Economic system of Islam" Hizb ut-Tahrir)

60. Apakah Khilafah menasionalisasi industri penting?

Konsep nasionalisasi tidak ada dalam Islam. Ini adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh negara-negara kapitalis ketika sifat eksploitatif kebebasan kepemilikan terlihat jelas. Dalam rangka mengatasi hal ini sebuah cara dikembangkan - nasionalisasi, di mana aset berpindah dari tangan swasta ke sektor publik karena kepentingan nasional.

Dalam Islam kepemilikan kekayaan, aset dsb. telah jelas diatur. Aturan Islam dalam perkara itu didasarkan pada kegunaan dan sifat dasarnya. Islam menentukan semua fasilitas yang mendasar adalah milik rakyat. Islam menetapkan fasilitas apapun yang dianggap tak terpisahkan bagi komunitas, yang tanpa itu mereka kesulitan untuk hidup sebagai komunitas, merupakan kepemilikan rakyat. Fasilitas seperti itu dimiliki publik dan diurus oleh negara untuk kemanfaatan semua warga. Ini digali dari hadits Nabi Saw.

"Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api."

Hadits ini menyebutkan tiga hal namun kita bisa melakukan analogi dan mendapatkan hukum atas semua fasilitas komunitas yang mutlak harus ada. Maka sumber air, hutan, ladang minyak dan sejenisnya semua adalah milik rakyat sebagaimana juga masjid, sekolah negara, rumah sakit negara, ladang batubara, pembangkit listrik, jalan raya, sungai, laut, danau, selokan umum, teluk, selat, bendungan dsb. Tentu Islam membolehkan kepemilikan jika perkaranya bukan yang mendasar bagi komunitas. Solusi ini memiliki efek yang unik bagi masyarakat, karena ia memastikan semua orang mendapatkan berbagai keperluan dasar hidup dan bukan di tangan monopoli korporat ataupun harganya tak terjangkau. (Lebih rinci rujuk "Economic system of Islam" Hizb ut-Tahrir)

61. Akankah Khilafah menghapus bank?

Bank hari ini menjadi sentral bagi dunia modern. Mereka menawarkan dan menggantungkan keuntungan dari jasa-jasa berbasis bunga/riba. Bank sekarang menyediakan jasa dan produk yang menggunakan uang itu sendiri sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan melalui bunga/riba. Hal ini tidak hanya haram, tapi juga memperlebar jarak antara kaum kaya dan kaum miskin dalam jangka panjang. Khilafah oleh karenanya menghapus bank dalam bentuknya yang sekarang. Khilafah akan membangun bank yang bertindak sebagai pemberi pinjaman tanpa bunga dan sebagai tempat berinvestasi dengan pendirian bisnis yang menyediakan barang dan jasa riil bagi masyarakat (syirkah). (Lebih rinci rujuk "Funds in the Khilafah State" Abdul Qadim Zallum)

62. Apakah Khilafah akan memakai mata uang tunggal di tanah-tanah Muslim seperti Euro?

Tidak. Khilafah akan menyatukan dunia Muslim dalam satu perekonomian dan satu sistem ekonomi yang digerakkan oleh satu kekuasaan. Khilafah menerbitkan satu mata uang untuk semua wilayahnya. Menciptakan satu mata uang tanpa satu kekuasaan politik atas semua wilayahnya adalah haram dan juga pasti akan gagal, sebagaimana kasus Euro. (Lebih rinci rujuk "Funds in the Khilafah State" Abdul Qadim Zallum)

63. Apakah Khilafah menerbitkan mata uangnya sendiri?

Ya. Dalam Islam, dalam hal menukarkan suatu komoditas dengan unit moneter tertentu, Islam telah menuntun kita dan Khilafah pada mata uang emas dan perak. Dalil Islam telah menetapkan emas dan perak sebagai unit pengukur bagi harga dan upah. Ini dipahami dari tindakan Nabi Muhammad Saw. ketika mengumpulkan Zakat, menarik pungutan sementara atas kaum kaya dan menetapkan denda, semua dalam ukuran menurut emas dan perak. (Lebih rinci lihat "Funds in the Khilafah State" Hizb ut-Tahrir)

Ini berarti mata uang harus dicetak dalam bentuk koin emas dan perak atau uang kertas yang sepenuhnya bercadangan 100% emas dan perak. (Lebih rinci lihat "Gold Standard, the future for a stable global currency," Hizb ut-Tahrir Britain)

65. Akankah Khilafah mengembangkan senjata-senjata nuklir?

Khilafah perlu menciptakan pencegahan untuk mencegah mereka yang punya rencana jahat atas tanah-tanah Muslim. Sementara senjata Nuklir bisa menciptakan kerusakan besar, fakta bahwa negara-negara lain telah memilikinya menjadikan Khilafah harus memilikinya sehingga tidak disandera oleh kekuatan asing. Allah Swt. telah membolehkan respon serupa ketika kaum Muslim dibunuh:

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." [QS An Nahl:126]

Ayat ini diwahyukan ketika perang Uhud di mana Kaum kufar memutilasi tubuh-tubuh Muslim. Demikian pula, simpanan berbagai senjata Biologi, Kimia dan radiologi harus disimpan untuk tujuan pencegahan dan kasus di mana musuh menggunakannya melawan Khilafah. Haruslah diingat bahwa sasaran mendasar kebijakan luar negeri Khilafah adalah mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Dalam rangka mencapai ini, bermacam manuver perlu diambil untuk menciptakan citra kekuatan. (Informasi lebih lanjut lihat, "Strategic Estimate 2012," Muslim Khilafah.com)

66. Akankah Khilafah punya program luar angkasa?

Ya. Penelitian dan eksplorasi luar angkasa adalah instrumen penting bagi pertahanan kehidupan di Bumi di zaman modern. Yaitu menjadi pengukur kemajuan teknologi, kunci dalam kehidupan masyarakat berteknologi modern, pondasi bagi pembangunan perekonomian berbasis pengetahuan dan perhatian utama bagi sumberdaya manusia yang maju dalam sains. Satelit banyak digunakan untuk memberi dukungan bagi militer dan berbagai aktivitas terkait keamanan. Satelit juga semakin digunakan untuk menyediakan dukungan langsung bagi operasi-operasi militer. Perkembangan demikian akan memberi Khilafah keunggulan besar atas musuh-musuh.

Pakistan dan Iran punya program luar angkasa paling maju di antara dunia Muslim; itu sedang digunakan untuk peluncuran satelit komunikasi dan untuk program misil mereka. Nigeria, Mesir, Indonesia, Turki, Algeria, Malaysia, Tunisia, Bangladesh dan banyak negara bekas Republik Soviet semuanya punya fasilitas dasar penelitian atmosfer tahap awal dan kemungkinan peluncuran satelit. Mengembangkan kebijakan luar angkasa yang terpusat akan berdampak besar menempatkan Khilafah terdepan dalam inovasi teknologi. Dengan itu Khilafah bisa mendayagunakan dari warganya sendiri para insinyur, teknisi, fisikawan dan ahli strategi terbaik. Ini artinya Khilafah mengembangkan roket-roket yang lebih kuat. (Lebih lanjut lihat, "Constructing an Industrialised Muslim World," Khilafah.com)

67. Bagaimana Khilafah menyediakan lapangan kerja?

Saat ini hampir semua tanah Muslim memiliki perekonomian yang tidak dibangun atas keunggulannya. Kebanyakan perekonomian mereka timpang di mana mereka bergantung pada sejumlah sumberdaya fossil atau pada sektor jasa. Dalam banyak kasus mayoritas penduduk bekerja di sektor yang memainkan peran kecil dalam menggerakkan perekonomian. (Lebih lanjut lihat, 'Dilemmas of the Arab Spring,' Khilafah.com)

Karena garis-garis batas di tanah Muslim adalah buatan, diciptakan oleh para kolonialis yang militernya telah hengkang, Khilafah akan memandang masalah ekonomi di berbagai kawasannya sebagai masalah ekonominya dan bukan semata masalahnya orang Suriah, Pakistan atau Mesir. Melalui terintegrasinya perekonomian di dunia Muslim, terjadinya pengulangan kerja yang tak perlu bisa dihindari. Perekonomian Afrika Utara kaya dalam pertanian, sementara perekonomian Hijaz kaya dalam minyak bumi. Khilafah akan segera melakukan industrialisasi dan mengusahakan swasembada. Ini akan memerlukan pembangunan infrastruktur dan industri berat, kebijakan demikian akan menciptakan jutaan pekerjaan dan mengatasi situasi pengangguran di kawasan. Itu juga akan mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan memungkinkan kawasan menggunakan pendapatannya, sehingga mendorong perekonomian lebih lanjut. (Lebih lanjut lihat, 'Constructing an Industrialised Muslim World,' Khilafah.com)

Mengembangkan industri pertahanan juga akan menciptakan pekerjaan dan memungkinkan Khilafah mengamankan perbatasannya. Ini karena industri pertahanan akan dirinci menjadi rantai suplai yang akan mengubah banyak daerah menjadi jalur produksi bagi kompleks pabrik-Industri. Ini akan menciptakan pekerjaan, kontrak-kontrak dan uang ke dalam setiap area Khilafah dan di waktu yang sama berkontribusi pada sasaran keseluruhan yang mencitrakan kekuatan dan pencegahan. (Lebih rinci lihat "Dilemmas of the Arab Spring," Khilafah.com)

68. Bagaimana Khilafah menangani inflasi?

Para penguasa di tanah-tanah Muslim saat ini bertanggung jawab atas tingkat inflasi. Karena mismanajemen luar biasa mereka atas perekonomian, ketika berhadapan dengan kemiskinan dan perlunya membayar utang dalam dan luar negeri, satu-satunya yang para penguasa di tanah Muslim ketahui adalah mencetak uang. Hal ini juga terjadi bahkan di negeri-negeri yang biasanya mengalami surplus milyaran. Ini adalah penyebab utama inflasi buatan di dunia Muslim. Pencetakan uang yang timpang dengan pertumbuhan ekonomi menurunkan nilai mata uang. Karena mata uang yang beredar hanya terbuat dari kertas, para pemerintah mampu mencetak seenaknya. Khilafah akan mengganti mata uang kertas lembek ini dengan standar bimetal emas dan perak, yang akan memastikan bahwa jumlah uang yang beredar benar-benar berbasis emas dan perak. Ini akan mencegah siapapun dari menyalakan printer untuk mencetak lebih banyak kertas uang, sehingga mencegah devaluasi mata uang dan mengurung peningkatan tajam harga-harga dalam perekonomian. (Lebih rinci rujuk "The Global Financial Crises: The self-destruction of global capitalism and an introduction to the alternative Islamic economic model" Hizb ut-Tahrir Britain)

69. Bagaimana Khilafah menggerakkan perekonomian tanpa bunga?

Konsep bunga/riba adalah sebuah alat yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan suplai uang dalam perekonomian dan untuk menghasilkan keuntungan komersial dengan menganggap uang itu sendiri sebagai komoditas. Khilafah diberi mandat untuk menerapkan standar bimetal emas dan perak, yang menghilangkan kemampuan negara untuk mengubah nilai mata uang. Ini menghilangkan peran bunga di tingkat negara dan meneguhkan lingkungan yang kondusif bagi bisnis dengan stabilnya mata uang. Lebih lanjut, bunga dalam industri komersial bertindak sebagai penghambat bagi distribusi kekayaan. Ini karena para investor ketika berhadapan dengan kemungkinan mendapatkan bunga bank maka akan banyak mengambil kesempatan itu daripada menggunakannya untuk usaha bisnis yang pasti ada risikonya. Padahal usaha bisnis akan menciptakan pekerjaan. Maka penghapusan bunga akan meningkatkan aktivitas ekonomi, sebaliknya bunga meningkatkan aktivitas ekonomi minoritas orang. (Lebih rinci rujuk "The Quest for Economic Progress - An Islamic Blueprint for Pakistan" Hizb ut-Tahrir Britain) Selain itu, perekonomian terbesar di dunia saat ini tingkat bunganya menjadi nol persen karena krisis keuangan. Perekonomian tanpa tingkat bunga tidaklah mustahil sebagaimana yang disangka sebagian orang. (Lebih rinci lihat 'The global credit crunch and the crises of Capitalism,' Khilafah.com)

70. Bagaimana Khilafah menghasilkan pendapatan?

Saat ini struktur pajak di tanah-tanah Muslim didasarkan pada model barat, yang telah mengakibatkan ketergantungan pada pajak-pajak konsumsi karena pajak penghasilan semakin sulit dipungut. Para pemerintah di seputar dunia Muslim telah ditekan oleh IMF dan World Bank untuk mengembangkan pajak tak langsung semacam pajak penjualan, pajak bisnis berjalan, dan tarif. Pajak-pajak semacam itu berdampak pada harga-harga domestik karena nilai pajak itu ditambahkan pada harga barang dan jasa sehingga menaikkan harga (pajak ditanggung konsumen).

Islam memiliki aturan yang jauh berbeda mengenai pungutan oleh negara. Bukannya memajaki pendapatan, kebijakan fiskal Islami pungutannya berfokus pada harta kekayaan - yaitu uang menganggur, tanah dan manfaat (masing-masing memiliki rincian tertentu bagi ditariknya pungutan). Islam memiliki beberapa pungutan terkait pengelolaan dan penggunaan tanah. Islam menentukan sangat sedikit pungutan, oleh karenanya sistem pungutan negara bukanlah beban pikiran rumit sebagaimana di Barat di mana penghasilan seseorang dipajaki, pengeluaran dipajaki dan tabungan dipajaki. (Lebih lanjut lihat 'The quest for progress, an Islamic blueprint for Pakistan,' Hizb ut-Tahrir Britain)

71. Bagaimana Khilafah mengatasi utang-utang di dunia Muslim?

Sementara dunia Muslim penuh sumberdaya mineral, banyak penguasa menjarah kekayaan alam itu dan mengambil utang untuk mendanai rezim mereka sendiri. Miskinnya kebijakan mereka bagi pembangunan berarti generasi masa depan dibebani pembayaran utang semacam itu, realitas ini artinya Barat ikut campur dan berpengaruh atas kebijakan ekonomi di dunia Muslim.

Dunia Muslim faktanya tidak memerlukan utang semacam itu. Tanah-tanah Muslim penuh sumberdaya alam yang bisa menghasilkan milyaran. Dengan kebangkrutan visi bagi negaranya, para penguasa korup terus mengambil utang demi utang karena mereka tidak punya sumber pendapatan lain untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang paling dasar.

Karena Khilafah adalah negara Berdaulat, ia akan menentukan secara bebas bagaimana utang-utang semacam itu akan dibayar (kalaupun akan dibayar). Semua pengaruh IMF dan World Bank dan juga pasar bebas asing akan didekonstruksi dan disingkirkan. Tidak ada institusi asing yang dibolehkan mengatur perekonomian Khilafah atau menentukan cara pembayaran utang. Jika pembayaran utang diambil sebagai kebijakan, jumlah aslinya saja yang akan dibayar, tanpa bunga dan para penguasa korup yang tadinya menyetujui utang itu akan berkontribusi pada pembayarannya. Cadangan batubara Pakistan yang senilai lebih dari 600 milyar barrel minyak sesungguhnya bisa membayar utangnya 12 kali lipat. Indonesia adalah di antara eksportir batubara, buah segar, timah dan gas alam cair terbesar, penghasilan ekspor itu sendiri sebenarnya bisa membayar semua utangnya. Pendapatan besar pertanian Turki dari ekspor agrariannya sesungguhnya lebih dari cukup untuk membayar semua utangnya. Mineral-mineral semacam itu ketika dijual di pasar internasional bisa mendatangkan lebih dari cukup mata uang untuk membayar utang. Realitasnya adalah kebangkrutan para penguasa Muslimah yang telah memborgol generasi masa depan. (Lebih lanjut lihat "Dilemmas of the Arab Spring," Khilafah.com)

72. Bagaimana Khilafah mengatasi kemiskinan?

Kemiskinan ada di dunia Muslim karena bermacam faktor, semacam Inflasi, campur tangan asing, kurang pembangunan, utang dan misdistribusi kekayaan. Semua perkara itu bisa diatasi dengan pendistribusian kekayaan secara adil.

Aturan-aturan Islam bagi perekonomian berfokus pada memastikan terjadinya sirkulasi kekayaan tanpa halangan. Bobot diberikan oleh Islam dalam hal ini dikarenakan penghasilan setiap orang dan perusahaan dan pemerintah berasal dari orang atau perusahaan lainnya. Pungutan oleh negara dianggap sebagai pendapatan negara dan pengeluaran bagi individu. Uang yang dibelanjakan untuk proyek-proyek oleh pemerintah dan gaji yang dibayarkan akan menjadi pendapatan bagi individu dan pengeluaran bagi negara. Uang yang dibelanjakan oleh karyawan untuk barang-barang adalah pengeluaran bagi mereka dan pendapatan bagi perusahaan. Apapun yang menghalangi sirkulasi bebas itu, seperti penimbunan, faktanya berarti mengambil kekayaan keluar dari sirkulasi. Ini akan mengakibatkan turunnya pembelanjaan, yang akan menurunkan produksi dan mengakibatkan melambatnya perekonomian.

Solusi-solusi unik dari Islam dalam mencapai sirkulasi kekayaan bebas hambatan termasuk: perekonomian Islam dibangun hanya dengan perekonomian riil dan tidak punya perekonomian non-riil gaya Barat. Perekonomian Islam memiliki kebijakan moneter aman dan stabil dengan standar emas dan perak. Kebijakan fiskal Islam menyingkirkan pajak bentuk langsung dan tak langsung. Larangan Islam atas bunga mendayagunakan kekayaan menganggur dan terdapat pula aturan-aturan rinci Islam mengenai intervensi Negara dalam perekonomian melalui pengaturan kepemilikan umum (Al-Milkiyah Al-Ammah). (Lebih rinci lihat "Manifesto for Pakistan" Hizb ut-Tahrir wilayah Pakistan)

73. Bagaimana Khilafah hidup tanpa utang luar negeri?

Selama berpuluh tahun utang luar negeri dipandang sebagai jalur cepat untuk pembangunan ekonomi. Sejak Perang Dunia II lebih dari \$2.3 trilyun telah keluar dari dunia Barat ke dalam proyek-proyek yang membantu dunia ketiga dalam petualangannya untuk keluar dari kemiskinan. Utang jarang diberikan dengan motif menolong semata. Utang sering diberikan sebagai cara mendukung kawan dalam politik internasional dan dengan maksud mempengaruhi proses politik di negara penerimanya.

Timur Tengah dan Afrika Utara menerima lebih dari \$500 milyar tiap tahun dari ekspor minyak saja. Realitasnya, dunia Muslim tidak memerlukan bantuan asing. (Lebih lanjut lihat. 'Geopolitical Myths,' Khilafah.com)

74. Akankah Khilafah menghapus sistem feodal yang mendominasi negeri-negeri Muslim?

Khilafah akan mensyaratkan semua pemilik lahan untuk mengolah tanahnya. Jika mereka tidak melakukannya dalam periode tiga tahun, Khilafah akan mengambil alih lahan itu dan memberikannya pada orang yang mau mengolahnya. Kebijakan ini didesain untuk memaksimalkan produktivitas tanah dan hasil-hasil pertanian dalam Negara. Oleh karenanya, ini menjadi kepentingan semua pihak bahwa tidak ada lahan yang terlantar. (Lebih rinci rujuk "Economic system of Islam" Hizb ut-Tahrir)

75. Bagaimana Khilafah mengembangkan industrinya?

Sementara dunia Muslim telah membuat beberapa perkembangan pabrik, pada dasarnya para penguasa Muslim di kawasan bersumberdaya mineral terbesar - yang sangat penting bagi pembangunan industri - telah gagal melakukan industrialisasi. Khilafah akan mengusahakan kebijakan berikut dalam rangka industrialisasi:

1. Khilafah pada kemunculannya akan mengamankan semua sumberdaya energinya; ini termasuk sumur energi, bendungan dan infrastruktur yang ada.
2. Khilafah akan mengambil kendali bahan-bahan mentah dan mengembangkan infrastruktur pengolah mineral yang penting bagi industri. Di waktu yang sama Khilafah akan mengembangkan kebijakan transfer teknologi dan keahlian dengan perusahaan asing yang ada di tanah-tanah Muslim.
3. Khilafah akan merestrukturisasi perekonomian dunia Muslim dengan mentransfernya dari pertanian dan perbankan ke industri.
4. Khilafah akan membangun pengolahan besi dan baja yang penting bagi industri berat dan kilang minyak yang penting bagi produksi energi.
5. Khilafah akan mengembangkan industri militer - ini akan bertindak sebagai pertahanan dan mendorong inovasi teknologi.
6. Khilafah akan mengembangkan infrastruktur domestik seperti transportasi, jalur kereta api, suplai air, jaringan listrik dan telekomunikasi, semuanya penting bagi pembangunan perekonomian domestik.

7. Khilafah akan membiayai program pendidikan baru dalam rangka meningkatkan tingkat baca di sekeliling dunia Muslim dan mengembangkan keahlian yang diperlukan untuk industrialisasi, selama periode transisi ini berbagai keahlian yang tidak tersedia di tanah Muslim akan dibeli dari luar negeri. (Lebih lanjut lihat, "Constructing an Industrialised Muslim World," Khilafah.com)

76. Bagaimana Khilafah akan mengembangkan teknologi ketika ia jauh ketinggalan negara-negara Barat?

Terdapat sejumlah kebijakan yang bisa diusahakan untuk mengubah situasi ini, semua dengan keunggulan dan kelemahannya. Pada dasarnya Khilafah akan memastikan teknologi dan keahlian ditransfer ke negara Islam. Ini bisa dicapai melalui:

- Kerjasama dengan negara asing
- *Reverse engineering* (perekayasa balik)
- Spionase korporat-industri luar negeri
- Melalui *trial and error*

Adanya ketergantungan dunia pada kekayaan sumberdaya energi fosil dunia Muslim, ini akan menjadi metode yang paling menarik. Kerjasama bilateral bisa dilakukan yang memangkas harga pasar minyak sebagai imbalan atas teknologi.

Kerjasama apapun harus memastikan teknologi dan keahlian benar-benar tertransfer, tapi ini hanya akan terjadi jika negara-negara itu mau bekerjasama dengan dunia Muslim.

Sementara semua negara menyangkal bahwa mereka melakukan *reverse engineering*, sebagian besar melakukannya. Cina dan Rusia telah melakukannya dengan sukses dalam sejumlah perlengkapan militer. Tantangannya adalah untuk benar-benar mendapatkan teknologi asing sejak awal, dan ini adalah kebijakan yang tepat untuk dijalankan. Masalah sebenarnya di dunia Muslim adalah tidak adanya kemauan politik untuk mengejar kebijakan seperti ini sedari dulu.

Dengan cara yang sama spionase industri bisa dilakukan, ini memungkinkan sebuah negara berkembang jauh lebih cepat dengan mencuri cetak biru teknologi, namun ini memerlukan negara, sebagaimana Cina telah lakukan, perlu banyak tahun untuk beroperasi di negara sasaran. (Lebih lanjut lihat, "CONstructing an Industrialised Muslim World," Khilafah.com)

77. Bagaimana Khilafah berswasembada?

Ini akan memerlukan bahan mentah dan mineral. Utamanya adalah industri berat yang akan mengubah mineral-mineral menjadi bahan berguna. Kebutuhan untuk mengekstrak dan memurnikan mineral dari minyak, batubara dan besi mentah mengantarkan pada pengembangan kilang dan industri berat.

Kilang, kompleks industri dan pabrik diperlukan dalam mengubah bahan mentah menjadi baja dan semen dan juga material yang akan diubah menjadi produk jadi. Di tahap inilah teknologi dikembangkan dan sejarah menunjukkan bahwa itu didorong oleh industri militer.

Pengetahuan teknis kemudian diperlukan dalam hal proses-proses untuk mencapai ini. Untuk ini dunia Barat menginvestasikan milyaran dalam penelitian dan pengembangan untuk memastikan mereka tetap terdepan dalam pengembangan teknologi.

Ada perkara keempat dan mungkin paling penting yang memungkinkan semua hal di atas terjadi - yaitu motivasi. Berswasembada memerlukan massa yang berkontribusi banyak pada proses itu, swasembada

perlu didanai dan mungkin perlu banyak pengorbanan untuk memulai semua proses. Kolonialisme dan superioritas adalah apa yang mendorong Kerajaan Inggris untuk industrialisasi, sementara perang sipil dan kemerdekaan menggiring AS ke industrialisasi, sementara sasaran komunisme memungkinkan Uni Soviet menjadi superpower.

Khilafah memiliki keunggulan sangat besar dengan memiliki sebagian sumberdaya penting dunia dan populasi yang besar. (Lebih lanjut lihat, "Constructing an Industrialised Muslim World," Khilafah.com)

Politik



78. Apa kebijakan luar negeri Khilafah?

Hari ini tidak ada negeri Muslim yang punya kebijakan luar negeri independen. Perkara kebijakan luar negeri sangat banyak didikte oleh negara-negara kolonial Barat pada para bonekanya yang memegang kekuasaan di dunia Muslim. Situasi ini muncul karena sistem politiknya memelihara, melindungi dan mendukung para politisi korup yang mendapatkan kekuasaannya, bukan dari rakyat, tapi dari rancangan kolonialis asing. Bantuan keuangan digunakan untuk menarik para penguasa korup itu untuk menerima utang asing dan kemudian bunga dari utang-utang itu digunakan untuk memperbudak negara, karena uang itu sendiri adalah persetujuan untuk saling mengeruk untung. Khilafah akan mematahkan belenggu perbudakan ini dengan menegakkan sistem politik di mana para pemimpin menghasilkan kekuasaan dari rakyat dan bukan dari kekuatan asing. Ia akan menolak gelas beracun utang luar negeri berbunga. Ini akan memungkinkan Khilafah untuk menegakkan kebijakan luar negeri yang benar-benar independen, yang tujuannya adalah menyeru umat manusia kepada cahaya Islam dan membebaskan dunia dari perbudakan kolonialisme dan kegelapan jahiliyah. (Lebih rinci lihat "Constructing the Khilafah's foreign policy," Khilafah.com)

79. Apakah kebijakan luar negeri Khilafah bukan Jihad melawan dunia?

Kebijakan luar negeri Khilafah adalah mengemban Islam ke dunia. Allah Swt. telah memberi aturan rinci mengenai bagaimana ini bisa dicapai dan membolehkan Khilafah untuk menentukan sejumlah manuver, teknik dan alat untuk mencapai ini. Mengemban Islam ke dunia utamanya adalah aksi politik, namun kekuatan perekonomian, militer dan perkembangan teknologi semuanya menyumbang pada menarik hati bangsa dan rakyat lain. Seperti Amerika hari ini, menggunakan bermacam gaya untuk menyebarkan jalan hidupnya, kohesi ekonomi melalui bantuan dan utang, demokrasi, intervensi militer dsb. Khilafah juga memiliki alat-alat politik maupun militer untuk digunakan. (Lebih lanjut lihat 'Islamic Personality vol 1,' Hizb ut-Tahrir)

80. Apakah non-Muslim dipaksa memeluk Islam?

Tidak. Islam jelas melarang pemaksaan seseorang untuk memeluk Islam. Islam ketika diterapkan sebagaimana di masa lalu bisa melayani baik Muslim maupun non-Muslim. Mereka yang tidak mengadopsi Islam, menjadi warga Khilafah dan memiliki hak yang tidak berbeda dengan kaum Muslim.

81. Apakah Khilafah punya hubungan dengan negara-negara non-Muslim?

Ya. Islam telah menggariskan hubungan-hubungan yang Khilafah bisa lakukan dengan negara-negara di dunia. Itu bisa hubungan ekonomi, budaya atau hubungan baik. Semua itu didorong oleh perlunya mengemban Islam ke seluruh dunia dan untuk mempertahankan wilayah Islam. (Lebih lanjut lihat 'constructing the Khilafah's foreign policy,' Khilafah.com)

82. Apakah Khilafah mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain?

Ya. Islam memandang perjanjian internasional sebagai bagian dari kontrak karena itu adalah kontrak persetujuan antara dua atau lebih negara yang mengatur beberapa aspek hubungan mereka. Oleh karenanya, sebagian besarnya, aturan standar kontrak/perjanjian ada juga dalam perjanjian internasional. (Lebih lanjut lihat 'Constructing the Khilafah's foreign policy,' Khilafah.com)

83. Bagaimana Khilafah membangun hubungan dengan seluruh dunia?

Khilafah akan membangun hubungan dengan negara lain berdasarkan pertimbangan berikut:

- negeri-negeri yang ada di dunia Islam dianggap bagian dari Khilafah meski mereka tidak menyatu secara geografis. Maka mereka tidak dimasukkan dalam ranah urusan luar negeri. Hubungan dengan negeri-negeri ini tidak dianggap sebagai perkara kebijakan luar negeri dan oleh karena itu Khilafah akan bekerja menyatukan kembali negeri-negeri itu.
- Negara-negara yang terikat perjanjian dengan Khilafah dalam hal ekonomi, perdagangan, hubungan baik atau budaya akan diperlakukan menurut perjanjian itu. Hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara semacam itu adalah untuk memperkuat Khilafah.
- Khilafah secara umum akan menghindari menandatangani perjanjian dengan negara-negara yang berencana buruk terhadap wilayah Islam. Orang dari negara-negara semacam itu boleh memasuki wilayah Islam, tapi hanya dengan paspor dan visa khusus untuk tiap kunjungannya.
- Kondisi perang diambil sebagai dasar hubungan dengan negara-negara yang Khilafah pandang sebagai negara-negara perang. Mereka akan ditangani seolah perang benar-benar ada - tanpa pandang ada gencatan senjata atau tidak - dan semua warga asing itu dilarang memasuki wilayah Islam. (Lebih lanjut lihat 'Introduction to the Constitution and the reasons which make it obligatory,' Hizb ut-Tahrir)

84. Bagaimana Khilafah menangani penjajah asing?

Dalam situasi serangan asing Khilafah seperti negara manapun di dunia akan berada dalam kondisi perang dan tindakan apapun yang menolak musuh akan diusahakan. Untuk meminimalkan situasi semacam itu Khilafah akan membangun pencegahan yang sangat kuat untuk membuat rencana agresi oleh musuh tidak menguntungkannya. Khilafah tidak mentoleransi serangan atas tanahnya atau rakyatnya. Unjuk kekuatan apapun akan ditanggapi dengan respon yang tepat, secara politik maupun militer. (Lebih lanjut lihat 'Dilemmas of the Arab spring,' Khilafah.com)

85. Bagaimana Khilafah menangani campur tangan AS di tanah-tanah Muslim?

Ini bisa dicapai dengan memberantas alat-alat AS di kawasan. Sejak AS datang ke tanah-tanah Muslim, ia telah menggunakan para penguasa antek, bantuan ekonomi dan penjualan militer sebagai alat utama dalam menjaga pengaruh di kawasan. Masing-masingnya perlu didekonstruksi dan dibuang.

Rusia dan Cina adalah contoh negara-negara yang menggunakan sumberdayanya dan posisi tawarnya secara strategis. Dunia Arab memiliki lebih dari 70% minyak dunia dan lebih dari 50% gas dunia, sebarang pengurangan produksi minyak secara global akan menyakiti perekonomian AS secara signifikan karena ia adalah konsumen terbesar akan energi fosil. Menggunakan sumberdaya kawasan secara strategis adalah jalan untuk mengusir pengaruh AS.

Sebagian besar kekuatan Amerika hari ini adalah fatamorgana. Tidak mampu mengalahkan pasukan minim senjata di Afghanistan setelah sepuluh tahun perang dan tidak mampu menarik dirinya sendiri keluar dari 'resesi besar,' Amerika bahkan memohon pada para penguasa korup Arab untuk menulis cek \$221 milyar dollar, menambal AS selama krisis keuangan global. Kartu-kartu as semua ada pada tanah-tanah Muslim, para penguasa kacung dan uangnya Amerika bisa segera menjadi impoten, persis seperti Amerika itu sendiri.

86. Amerika itu sangat kuat, jika dia melancarkan serangan bagaimana Khilafah bisa selamat?

Dalam sepuluh tahun terakhir dunia dan penduduk Amerika sendiri melihat bahwa menggunakan aksi militer, sebagaimana para *Neo-conservative* lakukan, sesungguhnya melemahkan kemampuan militer Amerika. Perang di Irak dan Afghanistan telah membeberkan kelemahan Amerika. Amerika mengandalkan para penguasa Muslim, bandaranya dan jalur logistiknya. Di Afganistan AS telah gagal menekan Taliban yang berkemampuan militer lemah dibandingkan dengan AS.

Para penguasa Muslim dengan bahagia memberi AS akses ke basis-basis dan bandara militer untuk mengadakan perang di Iraq dan Afghanistan dan basis-basis itu memungkinkan AS mensuplai pasukannya di garis depan dalam perangnya.

Khilafah perlu menekan kemungkinan terjadinya serangan, ia melakukannya dengan menaklukkan dan mengembangkan berbagai wilayah secara sangat cepat, sehingga AS harus berurusan dengan area yang sangat luas. Sebagaimana di Afghanistan dan Irak, semakin panjang jalur logistik maka akan semakin lemah garis depan perangnya. Juga harus diingat bahwa AS menggunakan sejumlah basis militer yang telah disediakan untuk mereka oleh para penguasa Muslim, memotong jalur pasokan semacam itu akan memperparah kemampuan AS.

Pencegahan yang utama adalah mengembangkan Senjata Pemusnah Massal (*Weapons of Mass Destruction*). Sangat kecil kemungkinan AS beraksi militer jika dia tahu bahwa sasarannya bisa merespon dengan penghancuran. Libya dipaksa menghentikan proyek senjata nuklir dengan imbalan dibolehkan kembali bekerjasama dengan komunitas internasional. Meski memiliki cadangan minyak terbesar di Afrika - yaitu incaran Barat yang berharga, Gaddafi menghentikan proyek WMD-nya. Jika Libya memiliki WMD, Barat pasti berpikir ulang tentang menginvasi negara itu.

Penyatuan negeri-negeri Muslim menjadi Khilafah yang luas akan mendongkrak keunggulan populasi, sumberdaya dan geografisnya. Dunia Muslim yang bersatu bisa lebih mampu bersaing dengan AS, EU dan tumbuhnya kekuatan India, China dan Rusia. (Lebih lanjut lihat 'Constructing the Khilafah's foreign policy,' Khilafah.com)

87. Akankah Khilafah punya hubungan dengan Israel?

Israel didirikan oleh Inggris sebagai kebijakan memecah-belah dunia Muslim dan supaya kaum Muslim terus terkuras energinya dengan perjuangan tiada henti. Sejak itu, Barat terus mempersenjatai Israel dan berpihak padanya seiring garis batas negaranya terus meluas. Hari ini Israel dan juga Barat tidak mampu menekan Umat untuk menerima legitimasi Israel.

Menurut Islam, Israel adalah negara yang harus diperangi, di mana hari ini dia masih menjajah, oleh karena itu Khilafah akan langsung berposisi perang dan berusaha menghentikan penjajahan semacam itu. Kolaborasi para penguasa Muslim yang ada telah memperkuat Israel dan oleh karenanya ketika jalur pasokan ini diputus maka Khilafah bisa mengakhiri penjajahan. (Lebih lanjut lihat 'Constructing the Khilafah's foreign policy,' Khilafah.com)

88. Akankah Khilafah mengakui negara-negara Muslim lain?

Khilafah memandang negeri-negeri Muslim lainnya sebagai bagian dari Khilafah dan berusaha menyatukan mereka dalam Khilafah. Ini akan mencapai kesatuan di antara Umat Islam, memberi mereka keamanan dan melindungi Umat secara global. Sehingga mereka akan dipandang sebagai bagian kebijakan dalam negeri Khilafah. Umat secara global akan diberitahu bahwa mereka diwakili oleh satu Khalifah, Khilafah akan secepatnya mengambil kendali di semua negeri Muslim sehingga setiap Muslim di dunia adalah dalam tanggung jawab Khalifah, serangan apapun pada Muslim manapun akan memunculkan respon dari Khilafah, garis-garis batas negara kebangsaan tidaklah relevan.

Para penguasa di dunia Muslim yang ada akan diperintah untuk melepaskan peran kekuasaannya karena Islam mewajibkan satu orang Khalifah saja, mereka akan diberitahu bahwa Khilafah akan menguasai negeri mereka baik mereka menyerah maupun tidak, semua ini dilakukan secara terbuka. Sasarannya adalah menyeru semua Muslim di seantero dunia, tanpa pandang etnis, warna kulit, dan kebangsaan dan memenangkan loyalitas mereka.

Khilafah akan mengambil alih semua organ negara baik sipil maupun pemerintahan, di seantero dunia Muslim. Empat posisi kekuasaan Islam - Khalifah, Qadhi, para wali dan mu'awin, akan dijalankan oleh mereka yang memahami sistem pemerintahan Islam, semua orang yang bekerja dalam posisi selain pemerintahan - yaitu 95% aparat negara, mereka akan diberi kebijakan Islam untuk diterapkan, yang jelas digali dari sumber-sumber Islam.

Khilafah melalui kebijakan ekonominya akan, insya Allah, dengan cepat berkembang. Dengan sasaran penyatuan-kembali melalui dakwah dan keberhasilan ekonomi, Umat secara global harus menihilkan seruan apapun dari orang-orang yang tidak mau bersatu dengan Khilafah. Khilafah yang kuat akan menjadi magnet kuat bagi banyak bangsa di seantero dunia. (Lebih lanjut lihat, 'Dilemmas of the Arab spring,' Khilafah.com)

89. Apakah Khilafah mengakui hukum internasional?

Hukum internasional adalah kepanjangan tangan kekuasaan kolonial yang hanya terap bagi negara-negara lemah. Negara-negara kolonial semacam Amerika mengadakan perang-perang dan agresi ekonomi melawan siapapun yang mereka inginkan, mengabaikan bermacam organisasi internasional yang banyak dipromosikan. PBB dikendalikan oleh negara-negara semacam itu dan PBB jelas tidak mampu mengambil keputusan efektif melawan berbagai kepentingan para kolonialis itu. Khilafah akan berkiprah dalam era politik baru, tidak hanya di dalam negeri tapi juga secara global, menantang para kolonial pencekik dunia. Khilafah terikat hanya oleh hukum Allah Swt., Syari'ah Islam. Maka, pengadilan, organisasi atau negara lain di dunia tidak boleh mengikat atau memaksa Khilafah. Namun Khilafah menjalankan urusannya dengan negara-negara lain menurut apa yang ditentukan Syariah. (Lebih rinci rujuk "Political Thoughts of Hizb ut-Tahrir" Hizb ut-Tahrir)

90. Apa kebijakan Khilafah atas Palestina?

Para penguasa Muslim di Timur Tengah satu per satu menjual Umat di Palestina dan berpihak pada Israel. Merekalah yang melegitimasi keberadaan Israel dan melemahkan Umat. Karena tanah itu dirampok dari Umat dan ada pasukan penjajah yang berusaha mendapat legitimasi, maka tidak ada solusi selain menumpas penjajahan itu. Inilah yang Islam wajibkan dan inilah yang Salahudin Ayubi lakukan di masa lalu.

91. Akankah Khilafah bergabung dengan OIC ataupun Liga Arab?

Tidak. Organisasi-organisasi itu didirikan setelah keruntuhan Khilafah oleh para kolonialis dan penguasa kacung dalam usaha menipu Umat sehingga tidak tercapai persatuan yang benar. Itu adalah organisasi-organisasi tipuan dan pemecahbelahan yang tidak bertujuan baik. Selain itu, tidak ada dalil dari teks Islam yang mendukung adanya koalisi di antara banyak negara Muslim, dan organisasi semacam OIC dan Liga Arab bertentangan dengan perintah Islam bagi Umat Muslim untuk hidup di bawah satu Khalifah dan oleh karenanya organisasi semacam itu batil. (Lebih rinci rujuk "Hizb ut-Tahrir" Hizb ut-Tahrir)

92. Bagaimana Khilafah akan berurusan dengan label negara jahat?

Label negara jahat (*rogue states*) dibuat di ibukota-ibukota Barat untuk membenarkan campur-tangan mereka di tanah-tanah Muslim dan untuk menekan seruan apapun bagi kembalinya Islam. Di tempat-tempat seperti Pakistan, rezim yang ada bergabung dengan Barat dalam memelintir Islam dengan sebutan Talibanisasi atau terorisme. Agenda oleh Barat adalah mengaitkan kekerasan dengan Islam dan katanya seruan apapun demi Islam adalah seruan untuk tindak kekerasan.

Dalam menangani perkara ini negara Khilafah perlu maju dan membeberkan kebohongan ini dengan membeberkan berbagai makar, rencana dan aksi Barat. Barat telah terlibat dalam banyak kejahatan keji namun tidak ada negara lain yang mempermalukan AS karenanya. AS berbohong tentang WMD di Irak dalam rangka mendapatkan emas hitam. Kerakusannya tidak terbatas ketika dia melakukan skandal Abu

Ghraib. Hubungan nyaman Barat dengan semacam Ben Ali, Gaddafi dan Mubarak belum pernah digunakan oleh negara lain untuk merendahkan Barat.

Pembahasan apakah suatu negara termasuk jahat atau tidak adalah pembahasan yang dikelola Kapitalis Barat yang mengabaikan kolonialisme dan bermacam kejahatan Barat di dunia Muslim. Menundukkan semua negeri yang memiliki akar Islam adalah strategi Barat untuk membelokkan kembalinya Islam. Menerapkan Islam dan menunjukkan jati diri yang sesungguhnya adalah cukup untuk membantah klaim-klaim Barat. (Lebih lanjut lihat 'Dilemmas of the Arab spring,' Khilafah.com)

Haruslah diingat bahwa cadangan energi raksasa di dunia Muslim harus digunakan untuk menundukkan negara-negara Kapitalis Barat.

93. Akankah Khilafah melancarkan serangan nuklir ke musuh-musuhnya?

Perang di masa modern dilakukan dengan bermacam teknologi dan strategi. Sebagian negara mengembangkan senjata nuklir karena ia mampu menciptakan kerusakan massal dengan sedikit bahan. Senjata nuklir hari ini masih menjadi senjata perang yang hebat. Bagi Khilafah, senjata nuklir adalah untuk mencegah mereka yang berencana jahat atas tanah-tanah Muslim. Islam pada dasarnya melarang penggunaan senjata nuklir karena ia menghasilkan kehancuran luas, sementara kebijakan luar negeri Khilafah adalah membangkitkan umat manusia dengan Islam bukan untuk membasminya. Namun, Islam membolehkan Khalifah melakukan hal yang sama dengan musuh atas serangan musuh pada Khilafah. Khilafah tidak akan melancarkan serangan nuklir terhadap dunia secara acak. (Lebih lanjut lihat 'Islamic personality vol 2,' Hizb ut-Tahrir)

94. Bagaimana Khilafah akan menangani AS

Karena AS adalah superpower dunia, dia mewakili Kapitalisme, Khilafah mewakili Islam dan perbedaan ini menghasilkan setiap pihak memandang lawannya sebagai penantang atas kedigdayaannya. Hasilnya, masing-masing akan memiliki kebijakan yang menunjukkan posisi berhadapan. Khilafah akan secara nyata berada dalam perang dingin dengan AS dan bersasaran menantang Kapitalisme.

Khilafah perlu menantang, menekan dan mengacaukan berbagai tujuan AS secara global, hal ini penting dilakukan dan penting bagi eksistensi Khilafah. AS adalah negara kolonial dan punya rencana jahat di seantero dunia. Kita melihat AS telah memanfaatkan krisis untuk mempertahankan sejumlah besar pasukan di kawasan itu, dia menggunakan ini sebagai basis untuk menyediakan keamanan bagi banyak (anteknya di) negara-negara Teluk.

Khilafah juga akan membongkar AS, yang superioritasnya dibangun atas dasar kebohongan. Di 2010, di AS, seseorang dibunuh setiap 35 menit, diperkosa setiap 6 detik, pencurian setiap 14 detik dan perampokan setiap 6 detik. (<http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2010/crime-in-the-u.s.-2010/offenses-known-to-law-enforcement/crime-clock>) Pola konsumsi AS telah menimbulkan sebak masalah kesehatan, di Amerika Serikat, 55% orang dewasa kelebihan berat badan menurut standar internasional. Sebak 23% orang dewasa Amerika dianggap obesitas. Dan tren itu menyebar ke anak-anak juga, dengan satu dari lima anak Amerika sekarang tergolong kelebihan berat badan. ('*Chronic Hunger and Obesity Epidemic; Eroding Global Progress*, ' World Watch Institute, March 2000, accessed 24th September 2009, <http://www.worldwatch.org/node/1672>) Sedot lemak sekarang adalah bentuk operasi bedah kosmetik terdepan di Amerika Serikat, 400.000 operasi dilakukan setiap tahun. Hubungan Khilafah dengan AS akan dibangun atas dasar menunjukkan kegagalan Kapitalisme dan superioritas Islam. (Lebih lanjut lihat 'the end of the American century and the rise of the rest,' Khilafah.com)

95. Bagaimana Khilafah akan menangani Rusia?

Rusia sedang mengalami peningkatan sejak runtuhnya Uni Soviet. Kemungkinannya sangat kecil Rusia akan beraliansi dengan Khilafah. Rusia memiliki sejarah lebih panjang daripada Inggris dan AS dalam mengkolonisasi wilayah Muslim.

Perhatian utama Rusia saat ini adalah AS dan pengaruhnya atas perbatasan Rusia. Karena Rusia berada dalam posisi menantang superpower dunia maka Khilafah harus memastikan Rusia masih fokus pada AS sementara Khilafah mengkonsolidasi situasi dalam negeri. Ini karena Rusia memiliki populasi Muslim cukup besar, jika ia memandang Khilafah sebagai ancaman maka ia akan fokus pada Khilafah sebab tanah-tanah Muslim berbatasan dengan Rusia. Jadi dalam kasus Rusia, Khilafah harus membangun kebijakan yang memastikan dia terus menantang AS. (Lebih lanjut lihat 'the end of the American century and the rise of the rest,' Khilafah.com)

96. Bagaimana Khilafah akan menangani Cina?

Cina dalam 5000 tahun sejarahnya adalah sebuah kekuatan global, dia tidak pernah mengembangkan wilayahnya. Cina sepanjang sejarah dipenuhi konflik internal antar bermacam dinasti dan mereka memandang orang asing sebagai setan. Akan menjadi kepentingan Cina untuk bekerjasama dengan Khilafah sebab tanah Khilafah terbentang dari satu sisi dunia ke sisi lainnya dan jalur pelayaran utama dunia ada di bawah otoritas Khilafah.

Sementara banyak pihak kagum atas perkembangan ekonomi Cina yang cepat, sesungguhnya dia adalah negara lemah, salah satu faktor pelemahnya adalah ukurannya. Cina tidak mampu mengintegrasikan kaum Cina yang bukan Han, maka adanya seruan perpecahan adalah apa yang memicu Cina menggunakan militernya untuk menjaga kestabilan sosial. Untuk saat ini, perkembangan cepat ekonomi memungkinkan sebagian besar orang Cina punya pekerjaan, tapi perekonomian berbasis ekspor ini tidak lestari.

The People's Liberation Army (PLA - Tentara Pembebasan Rakyat) utamanya dirancang sebagai kekuatan keamanan domestik - suatu yang dibutuhkan karena sejarah Cina penuh ketegangan internal. Karena didesain untuk keamanan internal, PLA secara didikan dan secara logistik tidak berselera melakukan invasi. Menggunakan pasukan keamanan untuk operasi ofensif akibatnya adalah kekalahan atau kesia-siaan berdarah.

Khilafah harus memanfaatkan ketergantungan Cina terhadap Sumberdaya mineral dan kelemahan militernya untuk mengatasi perkara Turkistan Timur dan kemudian membangun hubungan dengannya sehingga akan menjadi benteng dalam melawan Barat. (Lebih lanjut lihat 'Strategic Estimate 2012,' Khilafah.com)

97. Bagaimana Khilafah akan menangani Perancis?

Perancis sejak revolusi Perancis adalah negara kolonial. Perancis hari ini menganggap negaranya sebagai nenek moyang Kapitalisme. Kebanggaan inilah yang mendorong Perancis untuk mengkolonisasi tanah-tanah lain dan tidak hanya mencuri sumberdayanya tapi juga membuat penduduk jajahan untuk menyukai budaya Perancis. Perancis secara umum mengambil pendekatan konfrontatif dalam perkara kebijakan luar negeri; diperlukan 17 tahun bagi Perancis untuk benar-benar menaklukkan Algeria (Aljazair).

Khilafah harus langsung menantang Kapitalisme di Perancis seiring banyak pihak menganggap budaya Perancis telah mati. Sementara Perancis di masa terbitnya Kapitalisme ada di posisi memimpin Eropa, hari ini sebagian besar pemikir, filosof dan penggagas ide baru muncul di AS, hal ini membuat Perancis merasa tidak aman dan sangat pesimis tentang masa depannya.

98. Bagaimana Khilafah akan menangani Inggris?

Inggris memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan global, dia adalah negara pertama yang melakukan industrialisasi dan terlibat dalam banyak perang untuk melindungi posisi globalnya. Inggris sejak asalnya adalah negara kolonial. Inggris ahli dalam mengeksploitasi berbagai negeri dan bangsa untuk tujuannya

sendiri. Satu-satunya cara untuk menangani Inggris adalah dengan melawannya ketika sendirian, memastikan dia tidak punya asisten atau rekan.

99. Bagaimana Khilafah akan menangani Jerman?

Jerman memiliki sejarah hubungan dengan Khilafah. Dalam Perang Dunia 1 Khilafah dan Jerman bersekutu. Selama Jerman tidak ikut dalam menjajah tanah-tanah Muslim, Khilafah harus memanfaatkan basis produksi Jerman yang unggul yang membuat negara itu menjadi eksportir terbesar dunia. Khilafah harus menganggap Jerman sebagai kandidat yang mungkin digunakan untuk meretakkan kubu Kapitalis. Jerman menderita kekurangan bahan mentah, yang membuatnya semakin cenderung masuk ke persekutuan dengan Khilafah, dengan imbalan suplai bahan mentah yang stabil. Khilafah bisa menjadi sumber bahan mentah bagi Jerman dan mendapatkan dukungan darinya. Karena Jerman kekurangan ambisi politik global, Khilafah juga bisa memanfaatkan hubungan ini untuk mendapatkan teknologi yang Khilafah belum kuasai.

100. Bagaimana Khilafah akan menangani India?

Kebijakan Khilafah ada dua untuk India, yang pertama adalah menyelesaikan perkara Kashmir dan yang kedua adalah membawa Islam kembali ke anak benua itu.

Pakistan telah menggunakan perkara Kashmir untuk kepentingan politiknya sendiri. Dia menaikkan dan menurunkan konflik di area ini dan itu tidak menghasilkan apapun bagi Pakistan ataupun Kashmir. Sementara itu, penduduk Kashmir telah mengorbankan banyak darah mereka dalam perang melawan agresi India. Dalam Khilafah, penduduk Kashmir yang telah menderita di bawah penindasan India selama puluhan tahun, tidak akan dibiarkan begitu saja. Khilafah harus berusaha menggabungkan Kashmir sebagaimana tanah Muslim lainnya. (Lebih rinci rujuk "Political Issues - Muslim Occupied Lands," Hizb ut-Tahrir)

Dahulu ketika Islam masuk ke kawasan India pada 714, orang Hind punya sistem kasta yang menyesakkan dada yang membedakan orang atas dasar garis etnis yang mengakibatkan supremasi para putra mahkota yang memperbudak banyak orang untuk bekerja di ladang-ladang mereka dengan imbalan upah minim. Sejak kerajaan Hindu dan Buddhist memeluk Islam, Khilafah menjadi kekuatan pemersatu yang memfasilitasi penciptaan sistem hukum umum yang menggantikan sistem kasta. Islam menciptakan suatu sistem di mana kekuatan politik, hukum dan ibadah bersatu dengan cara yang mengamankan kepentingan rakyat. Kestabilan ini mengarahkan anak benua India menjadi penghubung antara Timur Jauh dan Miditerania.

Secara politik, India adalah negara yang memiliki banyak fragmen dengan persaingan antar faksi, dengan bermacam kepentingan, tarik-menarik dalam berbagai perkara berdasar geografis, religi, kasta dan kelas. Identitas Hindu India hari ini telah menerapkan sistem kasta yang membagi orang India dalam kelompok strata berdasar keturunan. Islam telah memecahkan masalah ini sebelumnya. (Lebih lanjut lihat "The end of the American century and the rise of the rest," Khilafah.com)

Kesimpulan

Selama lebih dari 18 bulan Umat di seantero dunia Muslim turun ke jalan untuk mengambil kendali atas tangan mereka sendiri. Para jongos Barat yang awet semacam Gaddafi di Libya, Mubarak di Mesir, Saleh di Yaman dan Ben Ali di Tunisia semuanya jatuh seiring Tsunami perubahan menggusur apapun yang menghalangi.

Sejumlah kelompok Islam telah muncul dengan dukungan besar dan kemenangan tiba-tiba dalam pemilu yang terjadi di Timur Tengah. Di Tunisia, Maroko dan Mesir, jutaan orang voting bukan pada nilai-nilai sekular liberal dan mereka sangat menginginkan pemerintahan Islam.

Namun para partai pemenang yang sebelumnya dalam kampanye berusaha meyakinkan massa bahwa mereka Islami, berubah menjadi meyakinkan Barat bahwa mereka moderat. Memang, dalam usaha memenangkan opini internasional, mereka telah mengabaikan semua kepalsuan identitas politisi Islam. Dalam melakukannya, mereka pikir mereka itu pragmatis, pintar dan jago politik. Namun semua yang telah mereka tunjukkan adalah oportunisme mereka, standar ganda mereka dan bahwa mereka tidaklah lebih berprinsip dibanding para sekularis. Ketika berhadapan dengan menerapkan politik Islam, mereka beralasan ada hambatan konstitusional dan perlunya memihak minoritas. Ketika berhadapan dengan menerapkan ekonomi Islam, mereka beralasan perlunya menjaga agar investor dan turis tidak ketakutan. Ketika berhadapan dengan menerapkan kebijakan luar negeri Islam, mereka beralasan perlunya menunjukkan citra moderat dan menyenangkan Barat. Memang, itu adalah kekhawatiran, kelemahan dan keinginan mereka menyenangkan Barat, nama mereka saja yang Politisi Islami. Realitasnya adalah bahwa berbagai kelompok Islam Mesir yang tadinya dipenjara oleh orang semacam Mubarak dan berteriak 'Islam adalah solusi,' saat ini sesungguhnya justru mencegah Umat dari berkuasanya Islam.

Umat Islam tidak perlu lagi mengalami siklus para penguasa dusta, yang manis di mulut terhadap Islam tapi menjaga berbagai kepentingan Barat. Arab Spring sangat riskan dibajak oleh partai-partai 'Islami' untuk kepentingan mereka sendiri. Setelah banyak orang berkorban di jalanan melawan para diktator, jutaan Umat di kawasan itu voting untuk partai-partai Islam karena dianggap mewakili Islam. Partai-partai Islam itu sekarang meragukan apakah Islam bisa diterapkan atau tidak dan mereka menemukan tiap alasan yang bisa ditemukan; untuk tidak menerapkan Islam.

Warisan bagi kaum Muslim seluruh dunia adalah Islam. Adalah Islam yang membangkitkan kaum Arab padang pasir ke berbagai penjuru dunia. Karena merekalah, Islam hari ini diyakini oleh banyak etnis dan manusia, yang dianggap ajaib oleh banyak pihak.

Islam cocok diterapkan hari ini sebagaimana di masa lalu. Ini karena teks Syari'ah (al-Qur'an dan ahadits) adalah pemikiran rinci, terluas cakupannya dalam keumuman dan lahan subur untuk menghasilkan prinsip-prinsip umum. Dengan menerapkannya melalui Khilafah, Syari'ah mengatur semua hubungan, antar individu, negara dan warga, atau antar negara, suku dan bangsa. Sebanyak dan sebaru apapun hubungan yang mungkin ada, pemikiran baru bisa digali dari teks Syari'ah. Islam memiliki cakupan terluas bagi pengambilan prinsip-prinsip, yang bisa terlihat dari tata bahasa, kalimat, kata, gaya ungkapan dalam hal luasnya cakupan penggunaan kata (mantuq), arti (mafhum), indikasi (dalalah), nalar (ta'lil) dan qiyas (analogi) berdasarkan *illat* Syar'i (kondisi yang menjadi syarat berlakunya hukum dari dalil Syar'i) yang memungkinkan penggalan hukum untuk kapanpun dan semata hanya dari Islam. Ini memastikan Syari'ah mampu meliputi tiap hal, perkara atau masalah untuk semua waktu dan zaman.

Khilafah adalah model pemerintahan unik, yang memiliki berbagai prinsip dan nilainya sendiri. Sejarah Islam adalah bukti bahwa Khilafah bisa dan cocok diterapkan manusia. Debat mengenai sistem apa bagi dunia Muslim terjadi karena kapitalisme sedang tenggelam dalam kesengsaraannya sendiri. Pasar bebasnya sekali lagi bunuh diri, menyeret jutaan orang ke kemiskinan dan menghancurkan tempat persemaian peradaban barat - Yunani. Media independennya terkuak ternyata tidak independen, bersenang-senang tidur bersama para politisi dan mau melakukan apapun demi profit. Skandal pembelanjaan negara di Inggris telah membeberkan bahwa politik parlemen tidaklah berbeda dengan apa yang terjadi di republik pisang.

Sejak Umat menggulingkan para penguasa diktator semacam itu, kelompok-kelompok di sistem sekular harus ingat bahwa mereka juga bisa dengan mudah dijatuhkan. Kelompok semacam itu berada di posisi kekuasaan dan sekarang mereka harus membuat kebijakan untuk berbagai problem di kawasannya seperti pengangguran, pembangunan dan kemiskinan. Sebagian dari Umat telah mempercayakan amanah kepada kelompok semacam itu sebab kelompok semacam itu bertiket Islami. Umat jelas percaya dan ingin hidup dengan Islam yang sesungguhnya. Pertanyaannya adalah apakah kelompok-kelompok bertiket Islami semacam itu benar-benar percaya dan mau sistem Islam.

Adnan Khan
26 Agustus 2012
8 Shawwal 1433 H

Referensi

Abdul Kareem Newell, "Accountabilty in the Khilafah," Khilafah.com, 2004

Abdul Kareem Newell "The Khilafah is not a Totalitarian State," Khilafah.com, 2007

Abdul Qadeem Zallum, "Islamic verdict on cloning" Khilafah publications, 1999

Abdul Qadeem Zallum, "Democracy is a system of Kufr" 2nd Edition, 1995

Abdul Qadeem Zallum, "Funds in the Khilafah State," 2nd Edition, 1998

Abdul Qadeem Zallum, "How the Khilafah was Destroyed," Hizb ut-Tahrir 2000

Abdurrahman Al-Maliki, "Nizam al Uqubaat – Punishment system in Islam," 2nd edition, 1990, Hizb ut-Tahrir, Dar ul Ummah, Lebanon

Adnan Khan "Constructing the Khilafah's Foreign Policy", November 2009, Khilafah.com

Adnan Khan "Geopolitical Myths," October 2008, Khilafah.com

Adnan Khan "The global credit crunch and the crisis of Capitalism," June 2008, Khilafah.com

Adnan Khan "The end of the American century and the rise of the West," June 2010, Khilafah.com

Adnan Khan, Lopa Hussain, "The Khilafah's Education Policy ," July 2009, Khilafah.com

Adnan Khan, Lopa Hussain, 'Does Islam oppress Women,' August 2009, Khilafah.com

Adnan Khan "Islam in the 21st century," October 2009, Khilafah.com

Adnan Khan "Islamic Reformation: The battle for hearts and minds," March 2008, Khilafah.com

Adnan Khan "Strategic Estimate 2012," January 2012, Khilafah.com

Ahmad Mahmoud, "The Da'wah to Islam" 5th Edition, 1995

Ahmed, ad-da'our, 'Ahkam al Bayinaat – The rules of Testimonial evidences,' Hizb ut-Tahrir, 1965

An-Nabhani, "The Economic System in Islam," Hizb ut-Tahrir, 4th edition, 1997

An-Nabhani, "The Ruling System in Islam," Hizb ut-Tahrir 5th edition

An-Nabhani, "The Social system in Islam," Hizb ut-Tahrir, 4th Edition 1997

An-Nabhani, "Islamic Personality Vol 1" Hizb ut-Tahrir, 1952

An-Nabhani, "Islamic Personality Vol 2" Hizb ut-Tahrir, 1952

An-Nabhani, "Political Thoughts" Khilafah Publications, 1999

An-Nabhani, "The Systems of Islam" Hizb ut-Tahrir, 2002, Khilafah publications

An-Nabhani "Party Structure" Hizb ut Tahrir, 4th edition, 2001

An-Nabhani, "The Islamic State" Hizb ut-Tahrir

Deciphering the 'Turkish model' of government," October 2011, Adnan Khan, New Civilisation,
<http://www.newcivilisation.com/home/international-affairs/deciphering-the-turkish-model-of-government>

Hizb ut-Tahrir "Ajhiza Dawlat-al-Khilafah - The Institutions of state in the Khilafah in ruling and administration", 2005, Lebanon

Hizb ut-Tahrir "A Warm Call From Hizb ut-Tahrir to the Muslims," Khilafah publications, 1962

Hizb ut-Tahrir, "Hizb ut-Tahrir: Introduction," Khilafah Publications, 2000

Hizb ut-Tahrir - Britain "Democracy in Crisis - How the Islamic Political System ensures Good Governance," May 2010

Hizb ut-Tahrir "Political Issues – Muslim Occupied Lands," 2003

Hizb ut-Tahrir "The Methodology of Hizb ut-Tahrir for Change" Khilafah publications, 1999

Hizb ut-Tahrir, "The Ruling on Muslim Participation in the Political Life of the West," 2003

Hizb ut-Tahrir, "Towards a Tranquil Safe World under the Shade of the Economic System of Islam," 2009

Hizb ut-Tahrir Britain, "Gold: The future for a stable global currency," January 2012

Hizb ut-Tahrir Britain, "The Quest for Economic Progress – An Islamic Blueprint for Pakistan," Khilafah publications, July 2009

Hizb ut-Tahrir Britain, "The Global Financial Crises: The self- destruction of global capitalism and an introduction to the alternative Islamic economic model" Khilafah Publications, March 2009

Hizb ut-Tahrir Wilayah Pakistan, "Manifesto of Hizb ut-Tahrir for Pakistan – Pakistan, Khilafah and the re-unification of the Muslim world" February 2010

Hizb ut-Tahrir, "Political Concepts of Hizb ut-Tahrir" 2005

Hizb ut-Tahrir, “Muqadimatud-Dustur Aw il-Asbabul Mujibatulah” the Introduction to the Constitution and the reasons which make it obligatory, 1977

Kemal Abu Zahra, “The centrality of the Khilafah in Islam” Hizb ut-Tahrir Britian, August 2009

Salim Fedricks “Political and Cultural Invasion” Khilafah Publications, 2002

Women Members of Hizb ut-Tahrir Wilaya Pakistan, “The role of Muslim Women in re-establishing the Khilafah state” August 2010, Pakistan